

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
KABUPATEN BLORA  
MENURUT PENGELUARAN**

**2015-2019**



## **Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Blora 2015-2019 Menurut Pengeluaran**

**Nomor Publikasi** : 33165.2002  
**Katalog BPS** : 9302004.3316  
**Ukuran Buku** : 17,59 cm x 24,99 cm  
**Jumlah Halaman** : 74 halaman  
**Naskah** : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

**Penyunting** :  
**Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora**

**Perancang Sampul** :  
**Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora**

**Diterbitkan** :  
**Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora**

**Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya.**

## KATA PENGANTAR

*Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas perkenan dan ijin-Nya, sehingga penyusunan PDRB Kabupaten Blora Menurut Pengeluaran 2015-2019 dapat diselesaikan. Publikasi ini melengkapi publikasi PDRB yang sudah ada yaitu PDRB Menurut Lapangan Usaha yang melihat dari sisi produksi, sedangkan publikasi PDRB Menurut Pengeluaran menggambarkan sisi belanja atau pengeluaran, yaitu pengeluaran rumah tangga dan pemerintah, pembentukan modal dan *net ekspor*.

Dalam publikasi ini diuraikan besaran PDRB yang meliputi beberapa komponen, yaitu komponen konsumsi, komponen investasi, dan net ekspor dalam seris lima tahun. Dari komponen-komponen tersebut akan tergambar bagaimana sebuah pengeluaran bisa memutar roda ekonomi di suatu wilayah.

Selanjutnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya publikasi ini. Saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan publikasi ini dimasa mendatang.

*Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.*

Blora, Mei 2020

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BLORA



Drs. HERU PRASETYO

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR/GRAFIK.....	v
LAMPIRAN TABEL .....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	4
1.3 Manfaat.....	5
BAB II METODOLOGI PENYUSUNAN.....	7
2.1 Siklus Kegiatan Ekonomi.....	8
2.2 Siklus Pendapatan dan Penerimaan Regional.....	12
2.3 Klasifikasi Kegiatan.....	15
2.4 Konsep Secara Umum.....	17
2.5 Komponen PDRB Menurut Pengeluaran.....	22
BAB III ULASAN.....	35
3.1 Komponen Pembentuk PDRB Menurut Pengeluaran.....	35
3.2 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.....	41
3.3 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit.....	46
3.4 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.....	48
3.5 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) .....	49
3.6 Net Ekspor.....	52

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Komponen Pembentuk PDRB Menurut Pengeluaran Adh Berlaku Tahun 2015 – 2019 (Milyar Rp).....	37
Tabel 3.2	Komponen Pembentuk PDRB Menurut Pengeluaran Adh Konstan Tahun 2015 – 2019 (Milyar Rp) .....	38
Tabel 3.3	Distribusi Komponen Pembentuk PDRB Menurut Pengeluaran Adh Berlaku Tahun 2015 – 2019 (%).....	39
Tabel 3.4	Pertumbuhan Komponen Pembentuk PDRB Menurut Pengeluaran Adh Konstan Tahun 2015 – 2019 (%).....	40
Tabel 3.5	Laju Implisit Komponen Pembentuk PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2015 – 2019 (%).....	41
Tabel 3.6	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Adh Berlaku Tahun 2015 – 2019 (Milyar Rp) .....	42
Tabel 3.7	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Adh Konstan Tahun 2015 – 2019 (Milyar Rp) .....	43
Tabel 3.8	Distribusi Kelompok Pengeluaran Terhadap Total Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Adh Berlaku Tahun 2015 – 2019 (%)..	44
Tabel 3.9	Pertumbuhan Kelompok Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Adh Konstan Tahun 2015 – 2019 (%).....	45
Tabel 3.10	Pengeluaran Konsumsi LNP Tahun 2015 – 2019.....	46
Tabel 3.11	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Tahun 2015 – 2019.....	49
Tabel 3.12	Pembentukan Modal Tetap Bruto Tahun 2015 – 2019 .....	51
Tabel 3.13	Net Ekspor Tahun 2015 – 2019.....	55

## DAFTAR GAMBAR/GRAFIK

Grafik 2.1 Siklus Kegiatan Ekonomi Tertutup.....	10
Grafik 2.2 Siklus Transaksi Ekonomi Terbuka.....	11
Gambar 2.3 Arus Pendapatan Faktor Regional.....	13

<https://blorakab.bps.go.id>

## LAMPIRAN TABEL

Tabel 1.	PDRB Kabupaten Blora Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015 – 2019 (Juta Rp) .....	55
Tabel 2.	PDRB Kabupaten Blora Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015 – 2019 (Juta Rp) .....	56
Tabel 3.	Distribusi PDRB Kabupaten Blora Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015 – 2019 (Persen) .....	57
Tabel 4.	Distribusi PDRB Kabupaten Blora Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015 – 2019 (Persen) .....	60
Tabel 5.	Indeks Perkembangan PDRB Kabupaten Blora Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015 – 2019 (Persen) .....	61
Tabel 6.	Indeks Perkembangan PDRB Kabupaten Blora Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015 – 2019 (Persen) .....	62
Tabel 7.	Indeks Berantai PDRB Kabupaten Blora Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015 – 2019 (Persen) .....	63
Tabel 8.	Indeks Berantai PDRB Kabupaten Blora Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015 – 2019 (Persen) .....	64
Tabel 9.	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Blora Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015 – 2019 (Persen) .....	65
Tabel 10.	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Blora Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015 – 2019 (Persen).....	66
Tabel 11.	Indeks Implisit PDRB Kabupaten Blora Menurut Pengeluaran Tahun 2015 – 2019.....	67
Tabel 12.	Perubahan Indeks Implisit PDRB Kabupaten Blora Menurut Pengeluaran Tahun 2015 – 2019 (Persen) .....	68

- MANFAAT -

PDRB

• MENURUT •

PENGELUARAN

MEMBERI GAMBARAN FENOMENA EKONOMI  
PERILAKU KONSUMSI MASYARAKAT,  
KONSUMSI PEMERINTAH DAN INVESTASI  
SERTA MEMBERI INFORMASI  
TENTANG SURPLUS ATAU DEFISITNYA  
NERACA PERDAGANGAN BARANG & JASA  
DENGAN PIHAK/WILAYAH LAIN

BAB

1

PENDAHULUAN



# Bab I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Secara matematis, pertumbuhan ekonomi merupakan turunan dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Dimana ada 3 pendekatan penghitungan PDRB, yaitu PDRB menurut Lapangan Usaha, PDRB menurut Pengeluaran dan PDRB menurut Pendapatan. PDRB menurut lapangan usaha didapat melalui pendekatan nilai tambah. Sampai saat ini pengukuran PDRB dengan menggunakan pendekatan nilai tambah sudah lebih maju dan lebih baik jika dibandingkan dengan pendekatan Pengeluaran maupun Pendapatan. Untuk PDRB Menurut Pendapatan sampai saat ini belum pernah menghitung, hal ini terjadi antara lain karena kendala-kendala di lapangan, terutama ketidaktersediaan data sekunder maupun keterbatasan dalam mendapatkan data primer, disamping teknik penghitungan maupun sumberdaya penghitungnya yang masih terbatas.

Pertumbuhan ekonomi Blora di tahun 2019 tercatat sebesar 4,05 persen, melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 4,41 persen. Salah satu yang cukup berpengaruh terhadap melambatnya pertumbuhan di tahun 2019 adalah kemarau yang cukup panjang di tahun 2019 yang berpengaruh terhadap turunnya produksi pertanian, dan turunnya produksi migas dibanding tahun sebelumnya. Kita ketahui bersama bahwa sebagian produk pertanian dan hasil eksplorasi migas merupakan komoditi barang yang di ekspor keluar wilayah Blora. Akibatnya komponen ekspor mengalami perlambatan di banding tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 ini lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah maupun Nasional. Ekonomi Jawa Tengah pada tahun yang sama tercatat tumbuh sebesar 5,41 persen, sedangkan Nasional tercatat tumbuh sebesar 5,02 persen. Dan seperti juga tahun-tahun sebelumnya, ekonomi Blora

masih tertumpu pada permintaan domestik dalam bentuk permintaan untuk konsumsi. Disamping itu ekspor terutama produk pertanian dan pertambangan penggalian, walaupun di tahun 2019 ini nilainya melambat, tetapi masih cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari sisi Pengeluaran. Walaupun beberapa komponen mengalami pertumbuhan konsumsi seperti pengeluaran konsumsi Rumah Tangga dan pengeluaran konsumsi LNPR, tetapi belum mampu menjaga pertumbuhan ekonomi seperti tahun sebelumnya.

PDRB Menurut Pengeluaran dapat memberikan gambaran fenomena ekonomi seperti perilaku konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah, dan investasi yang merupakan bagian dari pembentukan modal tetap dan inventori. Selain itu juga dapat diperoleh informasi tentang surplus atau defisitnya neraca perdagangan barang dan jasa dengan pihak atau wilayah lain. Jadi besaran PDRB menurut Pengeluaran tersusun dari tiga komponen utama, pertama adalah besaran Konsumsi, komponen kedua adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan komponen yang ketiga adalah Net Ekspor yaitu besarnya ekspor di kurangi dengan impornya. Dari komponen PDRB menurut Pengeluaran ini dapat diturunkan beberapa indikator makro di antaranya tingkat kecenderungan konsumsi marjinal (*marginal propensity to consume*), ICOR (*incremental capital output ratio*), rasio pembentukan modal tetap terhadap konsumsi, dan sebagainya.

Sebagai wilayah dengan jumlah penduduk cukup besar, Blora memiliki potensi permintaan domestik yang cukup baik. Permintaan untuk konsumsi rumah tangga akan bisa memutar roda ekonomi walaupun dengan pertumbuhan yang biasanya lambat. Demikian juga dengan ekonomi Jawa Tengah dan Nasional, selama ini permintaan domestik masih jadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi dilihat dari sisi pengeluaran.

Baik dari sisi produksi maupun dari sisi pengeluaran, laju pertumbuhan PDRB adh konstan atau disebut sebagai pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih menjadi *goal* atau tujuan utama dari sebuah pembangunan ekonomi. Walaupun pertumbuhan ekonomi yang sering dinyatakan juga sebagai peningkatan

output dan pendapatan riil perkapita memang bukanlah satu-satunya sasaran kebijaksanaan di negara-negara berkembang, namun kebijaksanaan ekonomi menaikkan tingkat pertumbuhan output masih perlu dilakukan karena:

1. Pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai suatu syarat yang sangat diperlukan untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat.
2. Pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai suatu prasyarat untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan lainnya, seperti: peningkatan pendapatan dan kekayaan masyarakat, ataupun penyediaan fasilitas dan sarana sosial lainnya (Thirwall: 1976).

Saat ini pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari sisi pengeluaran, komponen konsumsi memegang kontribusi terbesar. Komponen ini terdiri atas konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga nirlaba dan konsumsi pemerintah. Dari ketiga item komponen konsumsi, konsumsi rumah tangga masih cukup dominan. Konsumsi rumah tangga merupakan penyumbang terbesar pada komponen Konsumsi maupun *share* dalam PDB/PDRB menurut Pengeluaran, maka ketika permintaan akan konsumsi rumah tangga berubah sedikit saja, akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Blora, di level Jawa Tengah maupun Nasional kondisinya juga demikian.

Komponen konsumsi berikutnya yang cukup berpengaruh adalah pengeluaran konsumsi pemerintah. Konsumsi pemerintah terbagi dua, yaitu dalam bentuk belanja rutin dan dalam bentuk belanja modal atau disebut juga sebagai investasi. Sebagai penggerak roda ekonomi, peran pemerintah cukup signifikan. WW Rostow dan RA Musgrave menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal pembangunan ekonomi, menurut mereka, rasio investasi pemerintah terhadap investasi total dengan perkataan lain juga rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar, karena pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna

memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Bersamaan dengan itu porsi investasi pihak swasta juga meningkat. Besarnya peranan pemerintah salah satunya karena pada tahap ini banyak terjadi kegagalan pasar yang ditimbulkan oleh perkembangan ekonomi itu sendiri.

Selanjutnya bila pemerintah ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan berkelanjutan, proses-proses produksi melalui peningkatan investasi disemua bidang yang akan berimbas kepada peningkatan ekspor barang dan jasa harus bisa menjadi strategi baru untuk lebih mendorong ekonomi berputar lebih cepat. Sampai saat ini konsumsi masyarakat maupun sebagian konsumsi pemerintah menjadi pilar-pilar pertumbuhan ekonomi. Sisi kurang baik dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tinggi adalah cenderung meningkatkan impor, sehingga secara formula akan menurunkan Produk Domestik Regional Bruto.

## **1.2. Tujuan**

Hasil dari pelaksanaan pembangunan tentu saja diharapkan dapat dievaluasi dan ditindak lanjuti serta dapat dijadikan sebagai awal penyusunan perencanaan berikutnya sehingga pelaksanaan pembangunan kedepan lebih terarah, baik sasaran maupun manfaatnya. Berangkat dari situlah buku PDRB ini disajikan, dengan tujuan dapat dijadikan sebagai salah satu sarana tolok ukur untuk menilai kinerja pelaksanaan pembangunan khususnya dalam bidang ekonomi. Dalam buku ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran kondisi perekonomian ditinjau dari sisi Pengeluaran.

Hasil-hasil penyajian angka-angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Pengeluaran ini sangat berguna dalam pengambilan kebijaksanaan di bidang ekonomi antara lain: memberikan gambaran fenomena ekonomi tentang perilaku konsumsi masyarakat, pengeluaran konsumsi pemerintah pada umumnya serta investasi (fisik) pada khususnya. Selain itu juga dapat diperoleh informasi tentang surplus atau defisitnya neraca perdagangan barang dan jasa dengan wilayah lain. Dan berguna juga sebagai salah satu bahan untuk

analisa tingkat kemakmuran masyarakat, sebagai alat kontrol dalam pelaksanaan pembangunan dan sebagai alat evaluasi hasil-hasil pembangunan, serta sebagai bahan kebijaksanaan di bidang pembangunan dan pengarahan investasi.

### **1.3. Manfaat**

Penyusunan PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Blora 2015-2019 sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah pada umumnya dan pengambil kebijakan pada khususnya dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan dalam:

1. Mengetahui pola konsumsi makanan dan non makanan masyarakat/rumah tangga, konsumsi pemerintah dan konsumsi LNPRT.
2. Mengetahui pola investasi.
3. Mengetahui surplus atau defisitnya neraca perdagangan Kabupaten Blora.

Dengan demikian pemerintah punya dasar/pijakan yang kuat dalam membuat perencanaan pembangunan dengan lebih baik. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung agar proporsi pola konsumsi, pola investasi dan neraca perdagangan lebih berimbang sehingga mampu menggerakkan percepatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Blora.



1

PENDEKATAN PRODUKSI

2

PENDEKATAN PENDAPATAN

3

PENDEKATAN PENGELUARAN



## **Bab II**

### **METODOLOGI PENYUSUNAN**



ktivitas yang terjadi dalam masyarakat secara umum didasarkan pada dua motivasi pokok yaitu motif ekonomi dan motif non ekonomi. Kedua motif tersebut akan menimbulkan interaksi dalam masyarakat yang pada akhirnya akan berpengaruh pada arus ekonomi. Interaksi maupun transaksi yang terjadi dalam masyarakat terutama yang dilakukan pelaku ekonomi baik berbentuk tindakan produksi, konsumsi maupun akumulasi (investasi) akan membentuk suatu proses ekonomi yang panjang dan berkaitan.

Interaksi dalam masyarakat akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan tersebut terjadi sebagai akibat dari perkembangan jumlah penduduk, perubahan gaya hidup dan perilaku konsumsi dari sebagian besar masyarakat. Permintaan akan produk-produk ekonomi untuk memenuhi kebutuhan akan lebih banyak dan lebih bervariasi. Hal ini tentu akan direspon para produsen dengan meningkatkan produksinya baik secara kuantitas maupun kualitas. Para produsen akan mengoptimalkan dan mengefisienkan sumber daya yang dimilikinya dalam memproduksi barang dan jasa dengan meningkatkan teknologi produksinya. Proses peningkatan produksi barang dan jasa inilah yang disebut sebagai proses pembangunan ekonomi.

Komponen pengeluaran menjadi penyumbang terbesar pada PDRB menurut pengeluaran di Kabupaten Blora. Dan sampai saat ini komponen pengeluaran masih menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi. J.M Keynes mengungkapkan bahwa besar kecilnya konsumsi pada suatu waktu ditentukan oleh nilai absolute dari pendapatan masyarakat yang siap untuk dibelanjakan (*disposable income*) pada waktu berlangsung. Pola tingkah laku konsumsi masyarakat meningkat sejalan

dengan pertambahan nilai pendapatan dan Sedangkan James Dussenbery didasarkan kepada anggapan utama atau asumsi sebagai berikut:

- 1) Tingkat konsumsi adalah interdependent terhadap tingkat pendapatan tinggi atau kebiasaan yang terjadi sebelumnya. Disamping itu unsur status sosial seseorang juga turut menentukan tingkat konsumsinya. Dengan demikian tingkat pendapatan yang akan mempengaruhi konsumsi adalah nilai pendapatan relatif terhadap tingkat pendapatan tertinggi yang pernah dimiliki sebelumnya.
- 2) Tingkat konsumsi bersifat *irreversible* yang bermakna bahwa apa yang terjadi pada waktu pendapatan naik, tidak akan selalu merupakan kebalikan bila terjadi penurunan pendapatan.

## 2.1 Siklus Kegiatan Ekonomi

Konsep ekonomi klasik secara sederhana menjelaskan bahwa transaksi ekonomi (makro) yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, dibedakan menjadi dua kelompok pelaku utama yaitu produsen dan konsumen. Kelompok produsen menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh kelompok konsumen bagi kepentingan proses produksinya dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai produk barang dan jasa, atau lazimnya disebut sebagai output. Di sisi lain kelompok konsumen memiliki atau menguasai faktor-faktor produksi berupa tanah (*land*), tenaga kerja (*labor*), modal (*capital*) dan kewiraswastaan (*entrepreneurship*) yang digunakan oleh produsen sebagai input untuk mendukung kegiatan proses produksinya. Sebagai kompensasinya, konsumen akan menerima balas jasa dari produsen berupa sewa tanah, upah dan gaji, bunga modal, dividen serta bentuk keuntungan lainnya. Balas jasa yang diterima oleh konsumen ini merupakan sumber pendapatan masyarakat, yang selanjutnya akan digunakan untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhirnya.



Pada sisi yang berbeda, barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen tadi akan dibeli kembali oleh konsumen untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan antara penyediaan produk di satu sisi serta Pengeluaran (permintaan) di sisi lainnya ini disebut sebagai titik keseimbangan umum (*general equilibrium*) antara *Supply* dan *Demand*. Bahkan interaksi yang terjadi antara kedua kelompok besar pelaku ekonomi ini terjadi secara terus menerus dan berkelanjutan membentuk suatu siklus perekonomian. Pada proses ini produsen berfungsi sebagai penghasil produk, sedangkan konsumen sebagai pemakai produk akhir. Dari siklus makro tersebut dapat dilihat gambaran tentang struktur ekonomi serta perubahan-perubahan yang terjadi, pertumbuhan ekonomi maupun beberapa data agregat lainnya.

Pada sisi lain ada peran pemerintah dalam mengatur sistem ekonomi suatu wilayah. Peran utama pemerintah tersebut adalah sebagai regulator, fasilitator maupun stabilitator antara pihak produsen dengan konsumen dalam menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi, agar sistem ekonomi dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

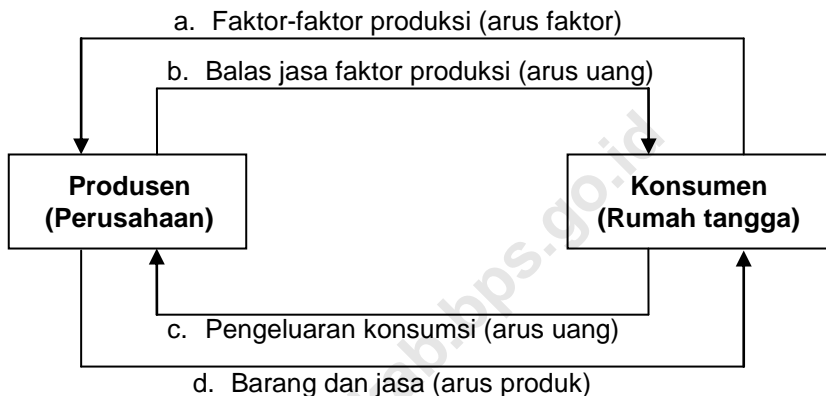
Untuk melihat siklus (perputaran) sistem perekonomian suatu wilayah atau negara secara sederhana adalah dengan menggunakan model **perekonomian tertutup** di mana diasumsikan tidak ada transaksi ekonomi antara wilayah tersebut dengan wilayah/negara lain (seperti halnya transaksi ekspor dan impor). Wilayah yang menganut sistem ekonomi tertutup tidak menggunakan produk yang dihasilkan oleh negara lain, begitu juga sebaliknya, negara lain juga tidak menggunakan produk yang dihasilkan oleh wilayah tersebut. Gambar 2.1 berikut menunjukkan hubungan transaksi dalam perekonomian tertutup.

Berdasarkan siklus makro, secara sederhana dapat dijelaskan beberapa arus transaksi yang terjadi antara produsen dengan konsumen sebagaimana berikut ini:

- a. arus penyediaan faktor produksi yang terdiri dari unsur tanah, tenaga kerja, kapital, kewirausahaan;

- b. arus balas jasa faktor produksi atau pendapatan yang terdiri atas unsur sewa tanah, upah dan gaji, bunga, deviden, serta keuntungan;
- c. arus pengeluaran untuk kebutuhan konsumsi;
- d. arus barang dan jasa yang menjadi konsumsi.

**Gambar 2.1. Siklus Kegiatan Ekonomi Tertutup**

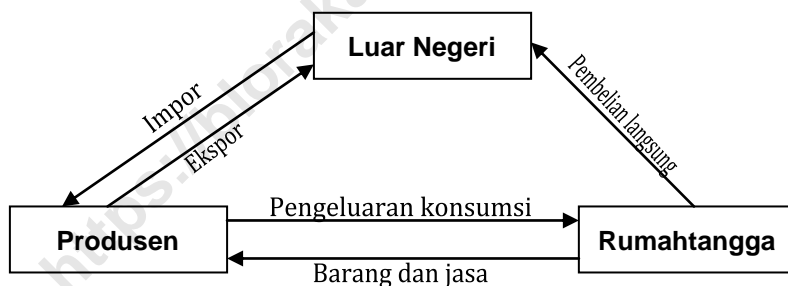


Gambar di atas menunjukkan adanya hubungan secara langsung antara arus produk dengan arus uang (moneter). Apabila seluruh transaksi dikonversikan kedalam satu satuan moneter (rupiah) maka keempat alur transaksi tersebut akan memberikan besaran nilai yang sama. Aliran faktor produksi dari rumah tangga ke produsen akan menyebabkan terjadinya arus balik dari produsen ke rumah tangga dalam bentuk pendapatan atau yang disebut sebagai balas jasa faktor produksi.

Pendapatan faktor yang dibayarkan oleh produsen tersebut merupakan sumber penerimaan bagi rumah tangga yang pada gilirannya akan digunakan untuk membiayai kebutuhan konsumsinya. Konsumsi tersebut meliputi Pengeluaran berbagai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen (perusahaan); Atau dengan kata lain pendapatan di satu sisi akan sama dengan Pengeluaran di sisi yang lain. Dengan demikian maka aliran produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen akan sama dengan aliran uang yang dibayarkan oleh rumah tangga untuk membeli barang dan jasa tersebut.

Dalam kenyataannya, barang dan jasa yang digunakan baik untuk konsumsi maupun barang modal, tidak semuanya berasal dari dalam negeri tetapi bisa juga sebagian dari luar negeri (impor). Juga sebaliknya barang dan jasa yang dihasilkan didalam negeri tidak semuanya digunakan di dalam negeri tetapi sebagian digunakan oleh luar negeri (ekspor). Seluruh aktivitas dan transaksi perdagangan tersebut akan tergambar dalam sistem **perekonomian terbuka** yang strukturnya sedikit lebih rumit dibandingkan dengan perekonomian sistem tertutup. Interaksi perdagangan antara pelaku ekonomi domestik dengan luar negeri akan menyebabkan terjadinya aliran devisa baik masuk maupun keluar wilayah. Dalam hal pendapatan regional, pengertian luar negeri bisa juga mencakup luar daerah atau luar wilayah.

**Gambar 2.2. Siklus Transaksi Ekonomi Terbuka**



Berdasarkan siklus ekonomi terbuka tersebut, Produk Domestik Regional Bruto, dapat dideskripsikan secara lebih jauh sebagai berikut:

- Kalau ditinjau dari segi produksi ( arus nilai tambah) disebut sebagai Produk Regional, yang merupakan penjumlahan komponen nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan oleh unit-unit produksi (produsen) di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.
- Kalau ditinjau dari segi pengeluaran atau Pengeluaran disebut sebagai pengeluaran/Pengeluaran atas produk regional (*regional expenditure*), yang merupakan penjumlahan dari pengeluaran konsumsi akhir yang dilakukan oleh

rumah tangga, lembaga nirlaba, pemerintah, maupun produsen dalam bentuk konsumsi akhir, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori serta ekspor dan impor suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.

- c. Kalau ditinjau dari segi pendapatan disebut sebagai pendapatan regional (*regional income*) yang merupakan jumlah pendapatan (balas jasa) yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki atau dikuasai oleh penduduk suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.

## 2.2 Siklus Pendapatan dan Penerimaan Regional

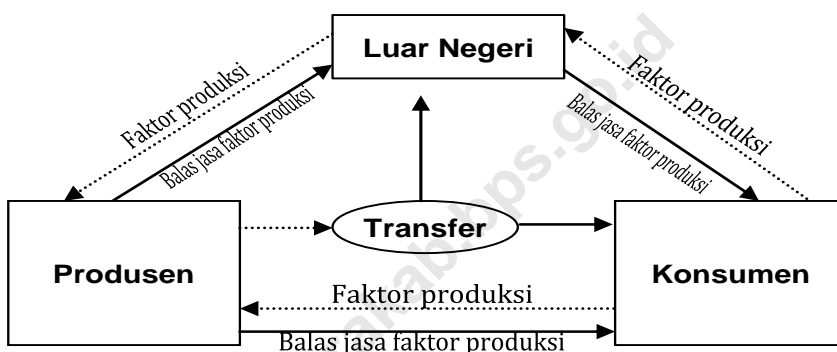
Tujuan akhir dari pengukuran PDRB adalah untuk menghitung besarnya “pendapatan” yang diterima oleh masyarakat di suatu wilayah. Pendapatan yang diterima inilah yang akan menjadi dasar ukuran kemakmuran suatu wilayah, karena dengan adanya pendapatan tersebut menyebabkan masyarakat dapat membiayai kebutuhannya. Analoginya, bahwa pendapatan tercipta akibat dari adanya proses produksi, dimana kemudian pendapatan tersebut akan digunakan oleh masyarakat sebagai sumber pembiayaan konsumsinya. Pendapatan yang berasal dari kompensasi faktor produksi ini akan di-redistribusikan kembali diantara kelompok masyarakat dalam bentuk hibah atau transfer, atau pemberian dalam bentuk lain (*natura*) secara cuma-cuma yang bersifat tidak mengikat.

Pendapatan yang mengalir antar wilayah tersebut dapat berupa pendapatan faktor itu sendiri (*distribusi primer*) atau redistribusi pendapatan (*distribusi sekunder*), antar pelaku ekonomi maupun antar wilayah dalam bentuk pemberian atau penerimaan hibah atau transfer. Dengan demikian maka untuk memperoleh gambaran penerimaan masyarakat yang sesungguhnya (*pendapatan disposabel*) harus diperhitungkan pula dengan aliran pendapatan yang mengalir keluar maupun yang masuk di wilayah tersebut, baik dalam bentuk pendapatan faktor netto maupun transfer/hibah netto.

Dalam kenyataannya, pendapatan yang dihasilkan oleh suatu wilayah belum tentu seluruhnya dapat dinikmati dan digunakan oleh masyarakat di wilayah

tersebut. Ada sebagian pendapatan yang mengalir keluar wilayah lain, begitu pula sebaliknya, ada pula pendapatan yang berasal dari wilayah lain yang dinikmati oleh masyarakat di wilayah tersebut. Implikasi dari kondisi tersebut adalah terjadinya aliran pendapatan antar wilayah, atau timbulnya arus pendapatan yang mengalir dari suatu daerah ke daerah lainnya, sebagaimana dijelaskan pada diagram berikut ini:

**Gambar 2.3: Arus Pendapatan Faktor Regional**



Pendapatan masyarakat yang berupa balas jasa faktor produksi, baik yang berasal dari wilayah tersebut maupun yang berasal dari wilayah lain dikurangi dengan pendapatan yang dibayarkan ke wilayah lain (faktor produksi dimiliki oleh wilayah lain), disebut sebagai pendapatan regional. Kemudian pendapatan regional yang ditambahkan dengan transfer yang diterima dikurangi dengan transfer yang dibayar ke wilayah lain ini disebut penerimaan disposibel regional. Penerimaan atas pendapatan faktor milik sendiri maupun yang diterima dari pendapatan faktor pihak lain ini digambarkan sebagai penerimaan masyarakat yang benar-benar dapat dibelanjakan dan dinikmati masyarakat di wilayah tersebut (*disposable income*).

Transfer merupakan proses pendistribusian atau pengalokasian kembali pendapatan faktor yang diberikan oleh pemilik faktor produksi kepada pihak lain secara cuma-cuma, atau tanpa adanya suatu kewajiban. Diartikan juga sebagai pemberian yang bersifat tidak mengikat yang digambarkan sebagai proses redistribusi pendapatan masyarakat sebagai akibat dari adanya dorongan, motivasi

serta tindakan sosial. Transfer yang dimaksud disini adalah transfer berjalan (*current transfer*) seperti halnya sumbangan bencana alam, sumbangan pendidikan, sumbangan kesehatan dan sebagainya. Dilihat dari lalu lintasnya maka transfer dapat terjadi antar rumah tangga, antara rumah tangga dengan pemerintah, antar pemerintah, antara rumah tangga dengan perusahaan, antar perusahaan serta antara perusahaan dengan pemerintah.

Dengan demikian pendapatan yang diterima masyarakat yang diterima dari berbagai sektor ekonomi produksi, akan didistribusikan atau dialokasikan kembali kepada pihak-pihak lain di dalam wilayah maupun antar wilayah. Relokasi pendapatan dalam bentuk transfer akan menyebabkan terjadinya transaksi penerimaan bagi kelompok penerima pendapatan dan kelompok pemilik faktor produksi. Sebagai contoh ada orang yang mempunyai pendapatan sebagai pemilik faktor produksi tetapi juga menerima bagian dari pendapatan milik pihak lain dalam bentuk hadiah atau sumbangan.

PDRB menurut lapangan usaha (pendekatan nilai tambah) lebih mencerminkan tentang tingkat produktivitas suatu daerah/wilayah; Data tersebut menjelaskan tentang kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan output (produk) serta dalam menciptakan nilai tambah. PDRB menurut Pengeluaran lebih menggambarkan tentang bagian dari produk regional yang digunakan untuk keperluan konsumsi akhir, pembentukan modal serta yang dieskpor. Untuk melihat peran ekonomi domestik maka total PDRB menurut sektor tersebut harus dikurangi dengan impor. PDRB menurut Pengeluaran dapat pula diartikan sebagai kemampuan masyarakat dalam menggunakan pendapatannya untuk keperluan konsumsi maupun untuk tabungan, dimana tabungan tersebut merupakan sumber investasi domestik (dilihat dari aspek moneter). Sementara itu transaksi ekspor dan impor lebih menggambarkan tentang kemampuan daerah dalam menciptakan pendapatan yang berasal dari transaksi perdagangan dengan wilayah lain, termasuk luar negeri. Sedangkan PDRB menurut pendekatan pendapatan lebih menekankan tentang aspek pemerataan pendapatan.

Tipikal arus transaksi yang sama berlaku pula bagi kegiatan dalam proses distribusi (*primary distribution*) serta redistribusi pendapatan (pengalokasian kepada pihak lain atau disebut sebagai transfer). Proses ini bisa juga terjadi antar daerah atau antar wilayah, yang pada akhirnya akan berdampak terhadap struktur pendapatan atau penerimaan daerah. Dengan demikian sebenarnya data agregat makro pendapatan disposabel regional (*regional disposabel income*) dapat lebih menggambarkan informasi tentang tingkat kemakmuran atau kesejahteraan sebagai dampak pembangunan, yang benar-benar potensi untuk dinikmati atau diakses oleh masyarakat.

Apabila dilihat dari ukuran pemerataan orang-perorang (nilai rata-rata), maka PDRB perkapita yang disebut sebagai ukuran produktivitas tersebut sebenarnya menggambarkan tingkat kemampuan potensial setiap individu di wilayah tersebut untuk menghasilkan produk atau menciptakan nilai tambah; Sedangkan pendapatan regional perkapita yang disebut sebagai ukuran kemakmuran menggambarkan tingkat kesejahteraan potensial yang dapat dinikmati oleh setiap individu di wilayah tersebut, tanpa perlu membedakan faktor jabatan, usia, jenis kelamin, suku bangsa, ataupun aspek sosial ekonomi lainnya.

### **2.3. Klasifikasi Kegiatan**

Pelaku kegiatan (aktivitas), transaksi maupun produk ekonomi yang terjadi di suatu wilayah sangat beraneka ragam dilihat dari sifat maupun jenisnya. Maka untuk kepentingan analisis, berbagai kategori atau karakteristik yang sangat beragam tersebut perlu dikelompok-kelompokkan ke dalam bagian-bagaian yang lebih kecil. Maksud utama pengelompokan melalui proses klasifikasi ini adalah untuk menghimpun data/informasi yang sangat heterogen ke dalam golongan yang sesuai sehingga karakteristiknya menjadi relatif sama (homogen). Keseragaman dalam konsep, definisi serta klasifikasi diperlukan dalam rangka keterbandingan data yang dihasilkan, sehingga gambaran mengenai perkembangan dan perbedaan antar daerah/wilayah, antar waktu atau antar karakteristik tertentu menjadi lebih baik dan lebih tepat.

Penggolongan yang paling sederhana adalah menurut pelaku ekonomi yang secara garis besar terbagi atas konsumen, produsen, pemerintah dan luar negeri. Penggolongan ini tentunya didasarkan pada fungsi dan tujuan utama masing-masing pelaku ekonomi tersebut. SNA 2008 menggolongkan pelaku-pelaku ekonomi (*actors*) menjadi korporasi (finansial dan non-finansial), rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, pemerintah, serta luar negeri (*rest of the world*). Konsep konsumen selama ini dipakai identik dengan rumah tangga sedangkan yang dimaksud dengan produsen adalah pelaku-pelaku ekonomi produksi. Lingkup ini tentunya sangat berbeda dengan klasifikasi yang digunakan dalam SNA 2008 yang lebih cenderung membuat klasifikasi berdasarkan institusi atau kelembagaan. Institusi ini bisa dalam bentuk perorangan atau pun kolektif.

Untuk selanjutnya transaksi-transaksi tersebut yang akan menjadi dasar penggolongan PDRB menurut permintaan/Pengeluaran akhir ini akan dibedakan sebagaimana berikut:

1. Konsumsi akhir

- Rumah Tangga (RT)
- Lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPR)
- Pemerintah (Pem)

2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

- Rumah tangga
- Pemerintah
- Badan usaha milik negara/daerah (BUMN/BUMD)
- Perusahaan swasta

3. Inventori (persediaan)

4. Perdagangan antar-wilayah

- Keluar (domestik, *outflow*)
- Masuk (domestik, *inflow*)



## 5. Perdagangan antar-negara

- Ekspor (luar negeri, *outflow*)
- Impor (luar negeri, *inflow*)

## 6. Diskrepansi statistik

Dengan demikian maka penggolongan tersebut merupakan kombinasi antara jenis transaksi, pelaku transaksi, serta wilayah transaksi yang dirinci sesuai dengan kepentingan analisis. Sementara itu meskipun sangat dimungkinkan tetapi komponen inventori tidak digolongkan secara rinci karena pertimbangan teknis semata.

Penilaian PDRB menurut pengeluaran/Pengeluaran lazim dilakukan dengan pendekatan arus komoditi (*commodity flow*), yang dengan kata lain disebut sebagai pendekatan tidak langsung (*indirect method*). Sampai sekarang, pendekatan dengan cara konvensional ini masih digunakan oleh hampir seluruh negara di dunia karena dianggap sebagai cara yang relatif mudah, praktis dan efisien. Pendekatan arus komoditi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap berbagai produk barang dan jasa (komoditi) baik yang berasal dari produk domestik maupun impor yang dikonsumsi oleh pelaku-pelaku ekonomi bersangkutan. Karena informasi yang dapat diperoleh dari masing-masing segmen pelaku konsumsi akhir bersangkutan belum memadai (kelengkapan, akurasi dan kesinambungan) menyebabkan metode ini masih direkomendasikan sampai saat ini. Perlu ditambahkan bahwa sebagian besar data konsumsi akhir ini diperoleh dari hasil sistem pencatatan administrasi.

### 2.4. Konsep Secara Umum

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa data PDRB ini sebagian besar diturunkan dari data neraca produksi. Khusus untuk PDRB menurut Pengeluaran, penggolongan dilihat dari struktur sisi keluaran (output). Pada sisi ini dapat ditelusuri lebih jauh Pengeluaran atas produk barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah tersebut. Dengan demikian maka seluruh transaksi yang ada dipastikan mempunyai keterkaitan dengan transaksi pada neraca-neraca lainnya, baik secara

langsung maupun tidak langsung (*articulated*). Neraca produksi merupakan neraca yang pertama kali terbentuk dalam perangkat data sistem neraca nasional (SNN) yang pada gilirannya akan menurunkan neraca-neraca berikutnya. Dari neraca produksi inilah pengukuran komponen PDRB melalui kedua pendekatan tadi dapat disajikan.

Beberapa konsep dasar yang melatarbelakangi penyusunan neraca nasional pada umumnya serta PDRB diuraikan di bawah ini.

- Wilayah ekonomi

Wilayah ekonomi adalah wilayah geografi yang secara administrasi dikelola oleh suatu pemerintahan (negara), di mana manusia, barang dan modal bebas berpindah, yang meliputi: wilayah udara, daratan dan perairan. Selain itu wilayah ekonomi ini juga mencakup wilayah khusus seperti kedutaan, konsulat dan pangkalan militer, serta zona bebas aktif (lepas pantai).

- Ekonomi Domestik

Ekonomi domestik adalah kegiatan ekonomi yang terjadi dalam wilayah domestik suatu daerah, yang dibedakan dengan luar daerah berdasarkan konsep residen, bukan karena unsur kedaerahan yang dilakukan oleh unit-unit institusi ekonomi yang dikelola oleh residen.

- Residen

Residen adalah unit institusi yang mempunyai pusat kegiatan ekonomi dalam batas ekonomi suatu daerah (*centre of economic interest*). Peran penting ini ditandai dengan dua faktor penting yaitu tempat tinggal (*dwelling*) dan tempat aktivitas berproduksi dalam jangka waktu yang relatif panjang, biasanya satu tahun. Tujuannya untuk membedakan batas teritorial suatu daerah terhadap daerah-daerah lainnya. Unit ekonomi yang bukan merupakan residen suatu daerah dianggap sebagai sektor luar daerah/luar negeri/asing (*non-resident*).

- Produk

Produk adalah output (keluaran) yang dihasilkan oleh suatu proses produksi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi di wilayah domestik, pada satu waktu tertentu. Produk yang dalam istilah lain disebut sebagai komoditi ini menurut sifatnya dibedakan atas produk dalam bentuk barang (*goods*) serta jasa (*services*).

- Produk Domestik

Produk domestik adalah nilai akhir produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor produksi dalam sistem ekonomi domestik, setelah diperhitungkan dengan nilai barang dan jasa yang berasal dari impor. Total penyediaan produk yang berasal dari produk domestik dan impor disebut sebagai total penyediaan (*supply*).

- Neraca Produksi

Neraca produksi adalah neraca dasar yang disajikan dalam format “T” yang berisikan data tentang perilaku dan proses produksi, yang alur prosesnya terdiri dari input, transformasi serta keluaran (output). Pada lajur kiri neraca disajikan data struktur input yang menggambarkan pengeluaran dari kegiatan produksi, yang secara garis besar dibedakan atas input antara dan input primer (nilai tambah bruto); Sedangkan pada lajur kanan diuraikan struktur keluaran yang bisa digolongkan lebih jauh menurut sifat produk, jenis produk, serta tujuan Pengeluaran produk.

- Domestik

Batas domestik adalah batas teritorial kegiatan ekonomi yang hampir mendekati konsep wilayah teritorial suatu negara secara hukum (batas administrasi), merupakan terminologi baku yang digunakan dalam penyusunan statistik neraca nasional yang memberikan batasan jelas tentang kawasan ekonomi penduduk, baik residen maupun non-residen.

- Nasional dan Regional

Produk domestik regional bruto (PDRB) adalah segmen PDB nasional berdasarkan wilayah kegiatan ekonomi, yang mengacu pada pembagian wilayah

administrasi pemerintah yang berlaku. Secara hirarkhi tingkat agregasi produk terdiri dari tingkat nasional (Indonesia), propinsi dan kabupaten/kota. Sesuai dengan kepentingan analisis maka batasan regional bisa pula dibuat menurut kelompok lain, seperti pengelompokan menurut pulau atau kepulauan atau pengelompokan menurut wilayah pembangunan.

- PDRB dan PDRN

PDRB merupakan produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik yang dibedakan dengan PDRN karena unsur penyusutan. Produk domestik regional bruto (PDRB) dikurangi dengan penyusutan sama dengan produk domestik regional neto (PDRN). Dalam pengukuran PDRB baik menurut sektor maupun menurut Pengeluaran unsur penyusutan harus diperhitungkan untuk menghindari terjadinya pencatatan yang tumpang tindih. Penghitungan atau pengukuran PDRB menurut lapangan usaha (nilai tambah sektor produksi) maupun PDRB menurut pengeluaran/Pengeluaran dilakukan dengan metode dan tatacara penghitungan yang berbeda, meskipun keduanya mempunyai tujuan akhir yang sama yaitu mengukur tingkat kemakmuran masyarakat. Apabila penghitungan dari sisi lapangan usaha lebih menekankan pada proses penciptaan (distribusi primer) oleh berbagai sektor ekonomi maka penghitungan PDRB menurut Pengeluaran lebih menekankan pada bagaimana pendapatan masyarakat digunakan atau dikeluarkan untuk kepentingan konsumsi akhir. Konsumsi akhir produk barang dan jasa bisa berasal dari produk domestik bisa pula dari wilayah lain (termasuk impor).

Pada umumnya cara pengukuran PDRB menurut pengeluaran menggunakan metode arus komoditi (*commodity flow method*), yaitu dengan cara menelusuri alokasi barang dan jasa yang tersedia (*supply*) yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di suatu wilayah, pada satu kurun waktu tertentu. Barang dan jasa tersebut bisa berasal dari produk domestik maupun impor (baik yang berasal dari wilayah lain maupun negara lain). Melalui pendekatan ini dapat dilihat konsistensi dan keterkaitan antara transaksi *supply* dengan *demand* berbagai pelaku ekonomi. Salah satu parameter atau data agregat pokok yang dapat diturunkan dari

perhitungan PDRB ini adalah pertumbuhan ekonomi atau yang biasanya disebut sebagai pertumbuhan riil. Parameter ini memberikan indikasi tentang perubahan kuantitas produk atau volume yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi produksi. Apabila pertumbuhan dari masing-masing sektor ekonomi produksi tersebut diagregasikan maka akan membentuk pertumbuhan ekonomi. Lazimnya metode harga konstan yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan metode yaitu i) revaluasi, ii) ekstrapolasi dan iii) deflasi. Tentu saja pendekatan mana dari ketiga metode tersebut yang dipakai harus disesuaikan dengan tingkat ketersediaan data (volume dan harga) pada masing-masing komoditi komponen PDRB.

Khusus bagi PDRB menurut pengeluaran metode deflasi merupakan pendekatan yang sangat direkomendasikan untuk digunakan karena pertimbangan praktis, yaitu tidak tersedianya data volume konsumsi akhir pada masing-masing komoditi komponen PDRB. Deflasi adalah cara menghitung nilai PDRB atas dasar harga konstan (adhk) yang diturunkan dari PDRB atas dasar harga berlaku (adhb). Apabila perhitungan PDRB adhb memberikan gambaran tentang perubahan volume maupun harga, maka PDRB adhk hanya menggambarkan tentang perubahan volume saja (perubahan harga sudah dieliminasi).

PDRB menurut Pengeluaran menggambarkan Pengeluaran barang dan jasa yang diproduksi oleh berbagai golongan dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut secara garis besar ada dua macam yaitu Konsumsi Antara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam proses produksi dan Konsumsi Akhir yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Barang dan jasa yang termasuk dalam konsumsi antara akan habis dalam proses produksi, sedangkan barang dan jasa yang termasuk konsumsi akhir meliputi:

- a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
- b. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba
- c. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Pertahanan
- d. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

- e. Perubahan Stok
- f. Ekspor
- g. Impor

PDRB menurut Pengeluaran di substitusikan ke dalam persamaan:

$$Y = C_h + C_n + C_g + I_f + I_s + X - M$$

Dimana:

$C_h$  = Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

$C_n$  = Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba

$C_g$  = Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan  
Pertahanan

$I_f$  = Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

$I_s$  = Perubahan Stok

$X$  = Ekspor

$M$  = Impor

## 2.5. Komponen PDRB Menurut Pengeluaran

### 2.5.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan pengeluaran rumah tangga atas barang dan jasa untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga dalam hal ini berfungsi sebagai konsumen akhir (*final demand*) dari berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia. Rumah tangga didefinisikan sebagai seorang atau sekelompok orang yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka secara bersama mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa yang utamanya berupa kelompok makanan dan perumahan.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup pengeluaran konsumsi rumah tangga atas barang dan jasa baik dengan cara membeli, menerima transfer, atau memproduksi sendiri dengan tujuan untuk dikonsumsi atau tidak diproses lebih lanjut menjadi produk baru, dikurangi hasil penjualan neto

barang bekas atau apkiran pada periode waktu tertentu. Barang dan jasa yang dimaksud antara lain dalam bentuk:

- makanan dan minuman, baik dalam bentuk bahan mentah maupun makanan jadi termasuk minuman beralkohol, tembakau, dan rokok ;
- perumahan dan fasilitasnya, seperti biaya sewa atau kontrak rumah, bahan bakar, rekening telepon, listrik, dan air, biaya pemeliharaan dan perbaikan rumah, termasuk imputasi sewa rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*) ;
- segala jenis bahan pakaian, pakaian jadi, alas kaki, dan penutup kepala ;
- barang tahan lama seperti mobil, meubeler, perabot dapur, TV, perhiasan, alat olah raga, binatang peliharaan, tanaman hias ;
- barang lain seperti bahan kebersihan (sabun mandi, sampo dsj.), bahan kecantikan (kosmetik, bedak, lipstik dsj.), obat-obatan, vitamin, buku, alat tulis, surat kabar, dan sebagainya; serta
- jasa-jasa seperti jasa kesehatan (biaya rumah sakit, dokter, imunisasi dsj.), jasa pendidikan (biaya sekolah, kursus dsj.), ongkos transportasi, perbaikan kendaraan, biaya hotel, tiket tempat rekreasi, biaya pembantu rumah tangga.

Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh penduduk di luar wilayah atau di luar negeri diperlakukan sebagai transaksi impor, sebaliknya pembelian langsung oleh bukan penduduk di suatu wilayah diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah yang bersangkutan. Termasuk dalam konsumsi rumah tangga adalah pembelian barang yang tidak ada duplikatnya (tidak diproduksi kembali) seperti hasil karya seni dan barang antik (yang dihitung nilai marjinnya). Meskipun barang tersebut sudah dinilai pada saat diproduksi, tetapi karena nilainya cenderung naik maka umumnya dari waktu ke waktu harga barang tersebut relatif lebih mahal. Pembelian atas produk lama semacam ini diperlakukan sebagai pembelian produk baru. Begitu pula dengan imputasi sewa rumah. Alasan diperhitungkannya nilai perkiraan sewa

rumah milik sendiri, karena dalam hal ini rumah tangga pemilik dianggap menghasilkan jasa sewa rumah bagi diri sendiri. Imputasi sewa rumah adalah perkiraan nilai sewa atas dasar harga pasar meskipun status rumah tersebut adalah milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa rumah, maka yang diperhitungkan adalah nilai sewa yang sebenarnya dibayar, baik dibayar secara penuh maupun tidak (karena mendapat subsidi).

Dalam komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga termasuk imputasi atas jasa layanan lembaga keuangan (seperti bank) yang disebut sebagai FISIM (*Financial Intermediation Services Indirectly Measured*). Pengeluaran tersebut berupa perkiraan nilai jasa layanan lembaga keuangan atas tabungan dan pinjaman yang dinyatakan dalam bentuk transaksi bunga. Transaksi pembayaran maupun penerimaan bunga oleh rumah tangga tidak digolongkan sebagai aktivitas produksi, tetapi sebagai bagian dari transaksi penerimaan lain (*property income*).

Pengeluaran peralatan kerja yang terkait dengan aktivitas pekerjaannya, tidak digolongkan sebagai konsumsi rumah tangga. Contoh apabila buruh tambang membeli peralatan sekop, linggis, lampu senter untuk mendukung pekerjaannya (dengan biaya ditanggung perusahaan), maka pengeluaran ini tidak termasuk sebagai konsumsi rumah tangga buruh tambang, tetapi merupakan biaya antara dari perusahaan tambang tempat buruh bekerja.

Model yang digunakan untuk kelompok ini adalah fungsi eksponensial. Model ini dipilih berdasarkan asumsi bahwa setiap penambahan pendapatan akan menyebabkan pertambahan konsumsi, tetapi pada suatu saat (titik jenuh) konsumsi tersebut mulai menurun, dengan bentuk kurva seperti parabola. Bentuk fungsi eksponensial tersebut adalah:

$$Q_i = a \cdot Y_i^b$$

Dimana:

$$Q_i = \text{Rata-rata konsumsi perkapita sebulan} \\ \text{(kuantum)}$$



a = konstanta

$Y_i$  = Pendapatan per kapita sebulan

b = Koefisien elastisitas

Koefisien elastisitas (b) pada dasarnya merupakan elastisitas pendapatan perkapita dari kuantum konsumsi (*Income Elasticity of Consumption*).

Perkiraan konsumsi rumah tangga untuk kelompok bukan makanan mengikuti fungsi linier, artinya setiap kenaikan pendapatan akan selalu diikuti oleh penambahan permintaan konsumsi bukan makanan. Dengan kata lain konsumsi bukan makanan tidak akan pernah sampai pada titik jenuh. Pola hubungan linier ini dapat diformulasikan sebagai:

$$C_i = a + bY_i$$

Dimana:

$C_i$  = Rata-rata nilai pengeluaran konsumsi perkapita sebulan untuk kelas/kelompok pendapatan rumah tangga ke i

a = konstanta

$Y_i$  = Pendapatan per kapita sebulan untuk kelas/kelompok pendapatan rumah tangga ke i

b = Koefisien fungsi linier

### 2.5.2. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) merupakan bagian dari suatu proses investasi fisik secara keseluruhan. PMTB dalam SNN merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto (PMB). PMTB didefinisikan sebagai pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun bekas dari luar negeri, dikurangi penjualan neto barang modal bekas. Diperhitungkannya barang modal bekas dari luar negeri sebagai barang modal baru di dalam negeri, karena nilainya secara ekonomi

belum diperhitungkan. Barang modal juga dapat diartikan sebagai barang atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi secara berulang-ulang dan mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih.

PMTB yang terdiri dari berbagai jenis dan wujud barang modal (kapital) ini dapat dibedakan menjadi tiga penggolongan atau klasifikasi pokok yaitu : menurut jenis barang, menurut sektor penguasa/pemilik (*holder*) dan menurut institusi. Penggolongan tersebut didasarkan pada jenis barang modal, perilaku pemilikan/ penguasaan barang modal serta institusi atau kelembagaan yang menguasainya, dengan uraian masing-masing sebagai berikut.

1. PMTB menurut jenis barang terdiri dari:

- i. penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) tetap baik baru maupun bekas yang dirinci menurut jenis aset seperti: bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & peralatannya, kendaraan dan ternak;
- ii. perbaikan besar aset berwujud; dan
- iii. biaya transfer kepemilikan aset.

2. PMTB menurut Lapangan Usaha

Yang dimaksud di sini adalah barang modal yang dimiliki atau dikuasai oleh sektor ekonomi produksi (produsen) yang digunakan dalam proses produksinya. Sektor-sektor ekonomi yang secara garis besar terdiri dari sektor primer, sekunder dan tertier ini secara rinci terdiri atas lapangan usaha: Pertanian; Pertambangan & penggalan; Industri pengolahan; Pengadaan Listrik dan gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan Daur Ulang; Bangunan/Konstruksi; Perdagangan Besar Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan;

Administrasi Pemerintahan; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya .

Rincian PMTB pada setiap lapangan usaha adalah sebagai berikut:

- i. di lapangan usaha pertanian mencakup semua bangunan bukan tempat tinggal yang digunakan oleh para petani untuk menyimpan hasil produksi, bangunan dan saluran air untuk irigasi, peningkatan mutu tanah, penanaman dan perluasan perkebunan, mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan untuk pertanian serta perbaikan besar-besaran atas mesin tersebut, dan pembelian ternak perah dan ternak yang dipelihara untuk diambil susu atau telurnya serta alat-alat penangkapan ikan dan tempat pemeliharaannya;
- ii. di lapangan usaha pertambangan terdiri dari perluasan areal pertambangan dan bangunannya, mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan pertambangan serta perbaikannya, kendaraan/alat pengangkut yang dipakai dalam usaha pertambangan dan barang-barang modal lainnya yang digunakan sebagai alat dalam berproduksi di sektor pertambangan;
- iii. di lapangan usaha industri pengolahan adalah semua barang-barang modal seperti gedung-gedung, kendaraan, mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan yang dipakai dalam usaha industri pengolahan termasuk perbaikannya;
- iv. di lapangan usaha pengadaan listrik, gas dan pengadaan air pengelolaan sampah dan daur ulang: mencakup pembuatan proyek pembangkit tenaga listrik, transmisi dan gardu distribusi beserta kantor-kantornya, dan pembelian/ penambahan prasarana produksi di sektor gas dan air minum.
- v. di lapangan usaha bangunan atau konstruksi adalah semua pembelian/penambahan prasarana produksi yang diperlukan dalam kegiatan konstruksi. Termasuk di sini kantor beserta peralatannya, alat-

alat besar dan kendaraan yang digunakan dalam menunjang kegiatan sektor konstruksi;

- vi. di lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, serta lapangan usaha akomodasi dan makan minum adalah semua barang modal yang dimiliki dan digunakan dalam kegiatan usaha yang meliputi bangunan bukan tempat tinggal beserta peralatan produksi yang ada, alat-alat transpor dan mesin-mesin yang dipakai. Termasuk juga asrama yang disediakan perusahaan untuk tempat tinggal pegawainya;
- vii. di lapangan usaha transport dan pergudangan dan lapangan usaha informasi dan komunikasi adalah semua kendaraan yang dioperasikan antara lain: bus, truk, sado, bajaj, becak, dan lain-lain, alat-alat angkutan di sungai, laut dan udara, kereta api termasuk kantor-kantor perusahaan jawatan kereta api serta pembuatan jalan-jalan kereta api, dan stasiun-stasiun dengan rambu-rambunya, bangunan bukan tempat tinggal dan kendaraan-kendaraan yang digunakan untuk menunjang usaha angkutan.
- viii. di lapangan usaha jasa keuangan, real estate dan jasa perusahaan mencakup bangunan bukan tempat tinggal yang dimiliki dan digunakan untuk operasi perbankan, kendaraan yang dimiliki dan dipakai untuk menunjang kegiatan perbankan. Termasuk juga kantor-kantor perwakilan perbankan beserta peralatan yang digunakan;
- ix. di lapangan usaha administrasi pemerintahan hanya barang-barang modal yang dibeli, dibuat atau diadakan oleh pemerintah untuk menunjang terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan saja. Barang-barang modal yang dimaksud adalah seperti gedunggedung/ kantor-kantor pemerintah, pembelian mobil pemadam kebakaran beserta peralatannya dan sebagainya, yang semuanya digunakan sebagai alat dari instansi-instansi pemerintah dalam memberikan jasa/pelayanan kepada masyarakat. Termasuk di sini pembuatan jalan-

jalan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Pembelian barang-barang modal oleh pemerintah untuk perusahaan-perusahaan negara dalam rangka bantuan pemerintah tidak termasuk dalam pembentukan modal sektor pemerintah melainkan merupakan pembentukan modal oleh perusahaan-perusahaan yang menerima sumbangan tersebut, misalnya pemerintah menyediakan anggaran untuk memperluas pabrik semen maka semua pengeluaran baik untuk pembuatan bangunannya maupun untuk pembelian mesin-mesin adalah merupakan pembentukan modal di sektor industri pengolahan; dan

- x. di lapangan usaha jasa-jasa: jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya, berupa gedung sekolah, rumah sakit, alat peraga pendidikan dan alat-alat kesehatan, gedung bioskop, taman hiburan, peralatan kantor, kendaraan dan sebagainya.

### 3. PMTB menurut institusi

Penggolongan ini menjelaskan tentang barang modal yang dimiliki atau dikuasai oleh pelaku-pelaku ekonomi (institusi) untuk digunakan dalam proses produksinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Institusi di sini dibedakan menurut Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) & Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta usaha swasta lainnya (termasuk usaha rumah tangga) yang meliputi:

- i. pemerintah mencakup pengeluaran untuk barang modal oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berupa, pembuatan gedung atau bangunan kantor, perumahan dinas, bangunan sekolah, bangunan puskesmas, jalan & jembatan dan infrastruktur lainnya;
- ii. BUMN/D, barang modalnya antara lain: lapangan terbang, pelabuhan, telekomunikasi, kereta api, pesawat terbang dan sebagainya; dan
- iii. swasta dan rumah tangga, barang modal yang dikuasai dapat berupa bangunan, mesin-mesin, kendaraan dan sebagainya.

### 2.5.3. Perubahan Inventori

Bersamaan dengan saat terjadinya perubahan tahun dasar pada tingkat nasional dari tahun dasar 1993 ke tahun dasar 2000 yaitu pada triwulan I tahun 2004 komponen perubahan inventori mulai diperkenalkan. Komponen perubahan inventori sendiri pengertiannya sama seperti perubahan stok yang sebelumnya digunakan sebagai komponen penyeimbang/sisa pada PDB menurut Pengeluaran.

Inventori merupakan persediaan barang (jadi maupun setengah jadi) pada unit institusi yang tidak terpakai pada proses produksi atau belum selesai diproses atau belum terjual, sedangkan perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode pencatatan dengan nilai inventori pada awal periode pencatatan. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori yang bisa bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif)

Secara umum Inventori ini meliputi:

- Barang yang dibeli tetapi belum terpakai untuk proses produksi
- Barang yang belum selesai dalam proses produksi
- Barang yang belum terjual
- Ternak potong
- Barang tahan lama yang masih dalam proses penyelesaian: seperti mesin-mesin, pesawat udara, kapal laut dan sejenisnya

Pada prinsipnya inventori merupakan persediaan barang setengah jadi maupun barang jadi yang dikuasai oleh berbagai pelaku ekonomi produksi maupun konsumsi. Barang-barang inventori ini akan digunakan lebih lanjut dalam proses produksi baik sebagai input antara maupun input akhir. Klasifikasi inventori menurut jenis barang dapat dibedakan atas:

- i. barang inventori menurut sektor penghasilnya seperti produk atau hasil dari: perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi/bangunan;
- ii. berbagai jenis bahan baku & penolong (material & supplies), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan yang diperoleh untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- iii. barang jadi, yaitu barang yang telah selesai diproses tapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang-barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- iv. barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- v. ternak untuk tujuan dipotong;
- vi. barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- vii. pengadaan barang-barang oleh unit perdagangan untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- viii. stok pada pemerintah yang mencakup barang-barang strategis, seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

#### **2.5.4. Transaksi Eksternal (Perdagangan antar-wilayah)**

Transaksi eksternal atau transaksi ekonomi yang mencakup perdagangan barang dan jasa antar-wilayah/daerah ini menjelaskan tentang proses atau alur distribusi produk domestik yang mengalir ke luar wilayah serta yang masuk ke dalam wilayah (domestik) tersebut. Karena lebih menekankan pada aspek riil maka yang dimaksud dengan produk di sini adalah berbagai jenis barang dan jasa atau yang disebut pula sebagai komoditas. Sedangkan yang dimaksud dengan wilayah di sini adalah wilayah negara lain (luar negeri) maupun wilayah atau daerah lain (propinsi maupun kabupaten), diluar wilayah domestik. Pada prinsipnya meskipun transaksi antar-negara dan antar-daerah

sama dalam pengertian perilaku (perdagangan antar-wilayah) namun sebenarnya maknanya agak berbeda. Transaksi antar-negara selain menunjukkan ketergantungan ekonomi suatu wilayah pada negara lain juga menyebabkan terjadinya aliran devisa (masuk maupun ke luar), sementara di sisi lain perdagangan antar-daerah hanya menyebabkan terjadinya aliran mata uang lokal (rupiah) antar-daerah. Dilihat dari kegiatan ekspor, dengan ke luarnya sebagian produk domestik ke negara lain maka akan menciptakan arus masuknya mata uang asing, sedangkan sebaliknya kegiatan impor akan menyebabkan mengalirnya pendapatan nasional (regional) ke luar negeri, sebagai akibat dari masuknya produk-produk negara lain.

Pada akhirnya kedua model transaksi tersebut akan mempengaruhi struktur pendapatan nasional (regional). Perbedaan transaksi antar-wilayah ini utamanya dibatasi oleh konsep wilayah ekonomi yang terdiri dari dua unsur yaitu “residen” dan “kegiatan ekonomi”. Pengelompokan residen dan non-residen berkaitan dengan kepentingan ekonomi (*economic interest*) yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi sebagai residen atau non-residen tersebut meliputi penduduk atau rumah tangga, perusahaan atau korporasi, pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya seperti lembaga nirlaba atau lembaga internasional lainnya seperti ILO, UNHCR, World Bank (Bank Dunia), IMF dan lain sebagainya.

Konsep dan definisi yang digunakan dalam transaksi eksternal antara lain:

#### 1. Antar-negara (Ekspor dan Impor)

Transaksi perdagangan antar-negara ini dicirikan melalui 2 (dua) aktivitas yang berlawanan, disebut ekspor apabila produk barang dan jasa dikirim ke luar negeri sebaliknya disebut impor apabila produk tersebut masuk ke dalam wilayah ekonomi (domestik). Meskipun secara garis besar penggolongannya terbagi atas barang dan jasa tetapi jenis-jenis komoditas



yang diekspor bisa berbeda dengan komoditas impor, tergantung kepada kebutuhan pasar di negara lain maupun di wilayah tersebut .

Ekspor barang dan jasa merupakan transaksi ekonomi penjualan, pertukaran (*barter*), atau hadiah (*gifts*) atau hibah (*grants*) yang dilakukan oleh penduduk residen suatu negara/wilayah (*region*) dengan non-residen atau pihak luar negeri atau wilayah (*region*) lain; Sedangkan impor merupakan transaksi ekonomi berupa pembelian, pertukaran (*barter*), penerimaan hadiah (*gifts*), hibah (*grants*), berbagai jenis barang dan jasa oleh residen dari non-residen. Konsep residen yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor suatu negara meliputi transaksi ekonomi yang dilakukan antara unit-unit institusi atau pelaku ekonomi suatu negara dengan unit-unit ekonomi negara lain.

## 2. Antar-daerah

Sebenarnya sampai sekarang belum ada satu pun panduan resmi yang menjelaskan tentang tata cara pencatatan kegiatan antar-daerah di dalam wilayah domestik suatu negara, sehingga pada prakteknya setiap negara mempunyai pendekatan sendiri yang berbeda-beda dalam upaya mengukur jenis transaksi perdagangan yang mendominasi peta ekonomi di setiap daerah di dalam negaranya. Lemahnya sistem administrasi pemerintahan dalam menyusun jenis statistik ini berdampak terhadap kualitas pengumpulan data transaksi yang sangat berarti dalam konteks mikro atau semi mikro ini. Dengan demikian dalam kaitannya dengan penyusunan statistik PDRB di sini, untuk selanjutnya yang dimaksud dengan transaksi eksternal antar-wilayah adalah sistem perdagangan barang dan jasa antara suatu wilayah dengan wilayah-wilayah domestik lainnya (tidak termasuk transaksi dengan luar negeri). Hampir seluruh wilayah di Indonesia mempunyai ketergantungan yang sangat kuat dengan wilayah-wilayah lainnya. Perbedaan struktur dan aktivitas ekonomi menyebabkan lalu lintas perdagangan barang dan jasa menjadi subur dan menjadi kian dominan.

Produk barang dan jasa yang diperdagangkan antar-daerah ini bisa berupa produk yang sejenis atau yang berbeda, tergantung pada kebutuhan masyarakat. Perdagangan produk ke luar suatu wilayah akan menyebabkan terjadinya aliran dana yang masuk ke wilayah tersebut, sedangkan sebaliknya produk masuk ke wilayah tersebut akan menyebabkan aliran dana ke luar wilayah. Kedua perilaku transaksi ekonomi tersebut pada akhirnya akan berpengaruh pula pada pendapatan wilayah (regional), dan pada gilirannya pada sistem pembangunan ekonominya.

<https://blorakab.bps.go.id>

KOMPONEN  
**PDRB**  
MENURUT  
PENGELUARAN



PENGELUARAN KONSUMSI  
RUMAH TANGGA



PENGELUARAN KONSUMSI  
LNPR



PENGELUARAN KONSUMSI  
PEMERINTAH



PEMBENTUKAN MODAL  
TETAP BRUTO



PERUBAHAN  
INVENTORI



EKSPOR  
DAN IMPOR

BAB

**3**

ULASAN

## **Bab III**

### **ULASAN**

#### **3.1. Komponen Pembentuk PDRB Menurut Pengeluaran**



DRB menurut Pengeluaran memiliki formula  $C+G+I+X-I$ , atau merupakan penjumlahan dari pengeluaran konsumsi Rumah Tangga (C), yang di dalamnya juga termasuk pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit; pengeluaran Konsumsi Pemerintah (G); Investasi yang terdiri atas Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Inventori (I) serta Ekspor (X) dikurangi dengan Impor (I). Dan bisa diringkas lagi menjadi 4 komponen, yaitu Komponen Konsumsi, Komponen Investasi dan Net Ekspor, yaitu ekspor dikurangi impor.

Dengan rumus:

$$\text{PDRB} = \text{Komponen Konsumsi} + \text{Komponen Investasi} + \text{Ekspor} - \text{Impor}$$

Komponen Konsumsi terdiri atas pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Komponen Investasi terdiri atas Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Inventori. Dari rumus tersebut mengatakan bahwa PDRB akan berbanding lurus dengan konsumsi, investasi dan ekspor. Semakin besar konsumsi, investasi dan ekspor, maka akan semakin besar PDRB suatu wilayah. Sebaliknya PDRB berbanding terbalik dengan impor, artinya semakin besar impor akan semakin mengecilkan nilai PDRB suatu wilayah. Apabila diaplikasikan pada suatu negara, semakin besar impor maka akan semakin mengurus devisa negara tersebut.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan pengeluaran rumah tangga atas barang dan jasa untuk tujuan konsumsi akhir, baik dengan cara membeli, menerima transfer atau memproduksi sendiri dengan tujuan untuk dikonsumsi atau tidak diproses lebih lanjut menjadi produk baru. Pengeluaran konsumsi Lembaga

Non Profit adalah berbagai pengeluaran oleh lembaga untuk pengadaan barang dan jasa, yang secara prinsip mempunyai fungsi dalam melayani rumah tangga. Lembaga non profit yang melayani rumah tangga merupakan satu entitas legal, yang secara prinsip terlibat dalam kegiatan layanan atau pemberian jasa kepada rumah tangga (non-market). Seluruh atau sebagian pembiayaan kegiatan lembaga bersumber dari sumbangan atau donasi rumah tangga. Oleh karenanya hampir seluruh aktivitas lembaga dirancang dan dikontrol oleh rumah tangga. Umumnya pekerja yang aktif dalam kegiatan lembaga merupakan tenaga kerja tidak dibayar. Sedangkan pengeluaran konsumsi pemerintah didefinisikan sebagai jumlah seluruh pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatannya, yang terdiri dari pembelian barang dan jasa (belanja barang), pembayaran balas jasa pegawai (belanja pegawai), dan penyusutan barang modal, dikurangi dengan hasil penjualan barang dan jasa (output pasar) pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah (yang bukan dikonsumsi oleh pemerintah). Konsumsi pemerintah disebut juga dengan output non-pasar pemerintah. Pengeluaran konsumsi pemerintah (umum) meliputi konsumsi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat meliputi seluruh instansi negara, baik yang ada di pusat maupun kantor wilayah (unit vertikalnya) di daerah. Sedangkan pemerintah daerah meliputi pemerintah daerah propinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa beserta perangkat dinas pada masing-masing tingkat pemerintahan tersebut.

Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) merupakan bagian dari suatu proses investasi fisik secara keseluruhan. PMTB didefinisikan sebagai pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun bekas dari luar negeri, dikurangi penjualan neto barang modal bekas. Barang atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi secara berulang-ulang dan mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih. Inventori merupakan persediaan barang (jadi maupun setengah jadi) pada unit institusi yang tidak terpakai pada proses produksi atau belum selesai diproses atau belum terjual, sedangkan perubahan

inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode pencatatan dengan nilai inventori pada awal periode pencatatan.

Ekspor neto merupakan selisih dari ekspor dikurangi dengan impor. Ekspor impor merupakan transaksi ekonomi yang mencakup perdagangan barang dan jasa antar-wilayah/daerah ini menjelaskan tentang proses atau alur distribusi produk domestik yang mengalir ke luar wilayah serta yang masuk ke dalam wilayah (domestik) tersebut.

PDRB Kabupaten Blora atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 menunjukkan pergerakan yang baik, meningkat sebesar 5,44 persen dari tahun sebelumnya, dari 24,64 triliun rupiah di tahun 2018 menjadi 25,98 triliun rupiah di tahun 2019. Komponen Konsumsi meningkat dari 18,16 triliun rupiah pada tahun 2018 menjadi 19,53 triliun rupiah di tahun 2019, atau naik sebesar 5,52 persen. Komponen Investasi (PMTB+ Inventori) juga mengalami peningkatan dari 2,88 triliun rupiah pada tahun 2018 menjadi 3,13 triliun rupiah pada tahun 2019, atau naik sebesar 8,65 persen. Sedangkan Net Ekspor yang merupakan selisih ekspor dan impor mengalami penurunan, dari 3,59 triliun rupiah di tahun 2018 menjadi 3,32 triliun rupiah di tahun 2019. Nilai Net Ekspor yang bernilai positif menggambarkan masih ada surplus barang dan jasa.

**Tabel 3.1. Komponen Pembentuk PDRB Menurut Pengeluaran  
adh Berlaku Tahun 2015 – 2019 (Milyar Rupiah)**

KOMPONEN PENGELUARAN	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	2	3	4	5	6
Komponen Konsumsi	14.679,07	15.753,54	17.009,37	18.163,12	19.528,11
Komponen Investasi	2.246,49	2.311,84	2.559,46	2.882,54	3.132,03
Ekspor Neto	(557,21)	1.945,56	2.297,00	3.591,73	3.317,30
<b>PDRB PENGELUARAN</b>	<b>16.368,35</b>	<b>20.010,95</b>	<b>21.865,83</b>	<b>24.637,40</b>	<b>25.977,45</b>

Ket : \* Angka Sementara \*\* Angka Sangat Sementara

Permintaan akan barang dan jasa akan memicu pertumbuhan konsumsi. Tetapi perlu diingat bahwa pertumbuhan konsumsi khususnya konsumsi rumah tangga akan memicu pertumbuhan tinggi akan impor barang dan jasa yang tidak bisa diproduksi oleh wilayah lokal. Sehingga agar pertumbuhan ekonomi lebih *sustainable*, disamping pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tinggi, juga harus diimbangi dengan pertumbuhan investasi dan ekspor yang tinggi pula.

Sedangkan menurut harga konstan, PDRB Kabupaten Blora tahun 2019 tumbuh sebesar 4,05 persen, dari 17,61 triliun rupiah di tahun 2018 menjadi 18,32 triliun rupiah di tahun 2019. Komponen Konsumsi meningkat sebesar 5,03 persen, dari 12,84 triliun rupiah pada tahun 2018 menjadi 13,49 triliun rupiah pada tahun 2019. Sedangkan Komponen Investasi (PMTB+ Inventori) juga mengalami kenaikan dari 2,03 triliun rupiah pada tahun 2018 menjadi 2,15 triliun rupiah pada tahun 2019, atau naik sebesar 5,81 persen. Dengan Net Ekspor yang mengalami penurunan, dari 2,73 triliun rupiah di tahun 2018 menjadi 2,68 triliun rupiah di tahun 2019.

**Tabel 3.2. Komponen Pembentuk PDRB Menurut Pengeluaran  
adh Konstan (2010=100) Tahun 2015 – 2019 (Milyar Rupiah)**

KOMPONEN PENGELUARAN	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	2	3	4	5	6
Komponen Konsumsi	11.196,66	11.685,55	12.250,83	12.843,98	13.489,58
Komponen Investasi	1.678,73	1.789,12	1.914,78	2.031,97	2.150,06
Ekspor Neto	7,20	2.440,00	2.701,04	2.733,77	2.682,49
<b>PDRB PENGELUARAN</b>	<b>12.882,59</b>	<b>15.914,66</b>	<b>16.866,64</b>	<b>17.609,72</b>	<b>18.322,13</b>

Ket : \* Angka Sementara \*\* Angka Sangat Sementara

Dengan melihat hubungan antara pendapatan dan permintaan, dimana nilai PDRB merupakan nilai seluruh pengeluaran akhir dikurangi nilai total impor, maka dapat diterjemahkan bahwa semua barang dan jasa yang dibeli suatu wilayah berasal dari produk wilayah itu sendiri dan dari produk luar wilayah (impor). Oleh karena itu

persentase impor terhadap total pembelian barang dan jasa dapat dijadikan indikator ketergantungan akan barang dan jasa suatu wilayah.

Distribusi PDRB merupakan gambaran besarnya sumbangan/*share* komponen tersebut terhadap PDRB. Semakin besar nilainya, berarti komponen tersebut semakin besar sumbangannya terhadap pembentukan PDRB dan sebaliknya. Sampai saat ini Komponen Konsumsi mempunyai nilai terbesar. Pada tahun 2019, Komponen Konsumsi yang meliputi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Konsumsi Lembaga Non Profit merupakan komponen dominan dengan *share* terhadap PDRB sebesar 75,17 persen, angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 73,72 persen. Demikian juga dengan Komponen Investasi, *share* nya meningkat dari 11,70 persen di tahun 2018 menjadi 12,06 persen di tahun 2019. Sedangkan untuk komponen net ekspor, *sharenya* mengalami penurunan dari 14,58 persen di tahun 2018 menjadi 12,77 persen di tahun 2019. Net ekspor merupakan selisih antara ekspor dikurangi dengan impor. Dengan net ekspor yang bernilai positif itu artinya nilai ekspor Blora lebih besar dari impornya. Saat ini ekspor Blora yang cukup dominan adalah dari komoditas Pertambangan Penggalian dan komoditas Pertanian.

**Tabel 3.3. Distribusi Komponen Pembentuk PDRB Menurut Pengeluaran  
adh Berlaku Tahun 2015 – 2019 (Persen)**

KOMPONEN PENGELUARAN	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	2	3	4	5	6
Komponen Konsumsi	89,68	78,72	77,79	73,72	75,17
Komponen Investasi	13,72	11,55	11,71	11,70	12,06
Net Ekspor	-3,40	9,72	10,50	14,58	12,77
<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Ket : \* Angka Sementara \*\* Angka Sangat Sementara

Indikator berikutnya adalah pertumbuhan komponen PDRB Menurut Pengeluaran. Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,05 persen di tahun 2019, yang merupakan rata-rata pertumbuhan dari masing-masing Komponen PDRB



menurut Pengeluaran, Komponen Investasi mencatat memiliki pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 5,81 persen. Komponen Konsumsi tumbuh 5,03 persen, sedangkan Net Ekspor karena merupakan selisih antara ekspor dan impor, sehingga tidak memiliki angka pertumbuhan yang relevan.

**Tabel 3.4. Pertumbuhan Komponen Pembentuk PDRB Menurut Pengeluaran adh Konstan (2010=100) Tahun 2015 – 2019 (Persen)**

<b>KOMPONEN PENGELUARAN</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018*</b>	<b>2019**</b>
1	2	3	4	5	6
Komponen Konsumsi	3,33	4,37	4,84	4,84	5,03
Komponen Investasi	-3,99	6,58	7,02	6,12	5,81
Net Ekspor	-	-	-	-	-
<b>PDRB</b>	5,36	23,54	5,98	4,41	4,05

Ket : \* Angka Sementara \*\* Angka Sangat Sementara

Laju implisit disebut juga sebagai inflasi PDRB. Dimana secara konsep Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa, kadang juga didefinisikan sebagai turunnya nilai mata uang (kebalikannya adalah deflasi). Biasanya ketika terjadi inflasi tinggi akan berpengaruh terhadap tingkat daya beli masyarakat, sebaliknya jika tidak ada inflasi bahkan terjadi deflasi, hal ini juga tidak menguntungkan bagi para pelaku ekonomi. Dan apabila terjadi deflasi terus menerus akan menyebabkan terjadinya stagnasi ekonomi atau bahkan bisa menimbulkan resesi ekonomi.

Dalam penyusunan PDRB, kenaikan harga telah memicu inflasi PDRB. Kondisi ini bisa dilihat dari pertumbuhan PDRB adh berlaku yang relatif lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDRB adh konstan. Kondisi ini terjadi karena adanya pengaruh/ faktor harga pada setiap komponen pengeluarannya. Pada tahun 2019, laju implisit tercatat sebesar 1,34 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 7,92 persen.

**Tabel 3.5. Laju Implisit Komponen Pembentuk PDRB  
Menurut Pengeluaran Tahun 2015 – 2019 (Persen)**

<b>KOMPONEN PENGELUARAN</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018*</b>	<b>2019**</b>
1	2	3	4	5	6
Komponen Konsumsi	4,76	2,83	2,99	1,85	2,37
Komponen Investasi	6,65	-3,44	3,45	6,13	2,69
Net Ekspor	-	-	-	-	-
<b>PDRB</b>	<b>2,87</b>	<b>-1,04</b>	<b>3,10</b>	<b>7,92</b>	<b>1,34</b>

Ket : \* Angka Sementara    \*\* Angka Sangat Sementara

### **3.2. Pengeluaran Konsumsi RumahTangga**

Konsumsi Rumah Tangga sering kali dijadikan barometer kesejahteraan masyarakat. Peningkatan konsumsi dan perubahan proporsi pola konsumsi, dimana proporsi non makanan menjadi lebih besar dari proporsi makanan, dijadikan indikator kemampuan daya beli dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara teori peningkatan konsumsi rumah tangga dipacu oleh adanya penambahan penduduk, peningkatan pendapatan masyarakat maupun perubahan pola konsumsi masyarakat. Peningkatan permintaan atau konsumsi merupakan pangsa pasar yang dapat menggerakkan roda perekonomian. Peningkatan konsumsi baik nominal maupun ragamnya, akan dibarengi meningkatnya permintaan akan barang dan jasa. Peningkatan permintaan ini akan menggerakkan sektor-sektor ekonomi lainnya. Namun yang perlu diwaspadai ketika permintaan akan barang-barang konsumsi meningkat, dimana wilayah tersebut tidak bisa menghasilkan barang dan jasa sendiri maka permintaan barang dan jasa akan impor dari luar daerah. Secara teori impor barang dan jasa akan menurunkan angka PDRB.

**Tabel 3.6. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga  
adh Berlaku Tahun 2015 – 2019 (Milyar Rupiah)**

URAIAN	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	2	3	4	5	6
a. Makanan, Minuman dan Rokok	5.266,55	5.730,78	6.131,42	6.510,71	6.949,61
b. Pakaian dan Alas Kaki	464,94	498,27	546,50	578,57	620,86
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyel Rmh Tangga	1.438,28	1.567,85	1.707,49	1.829,79	1.938,31
d. Kesehatan dan Pendidikan	762,51	833,61	910,82	999,39	1.068,69
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	3.455,83	3.659,55	4.012,98	4.265,92	4.713,42
f. Hotel dan Restoran	803,43	866,74	946,30	1.034,11	1.151,55
g. Lainnya	327,57	355,27	383,58	422,41	451,90
Pengeluaran Konsumsi Ruta	12.519,11	13.512,08	14.639,08	15.640,90	16.894,34
PDRB	16.368,35	20.010,95	21.865,83	24.637,40	25.977,45
Prosentase	76,48	67,52	66,95	63,48	65,03

Ket : \* Angka Sementara \*\* Angka Sangat Sementara

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga atas dasar harga berlaku di Kabupaten Blora pada tahun 2019 mengalami peningkatan, dari 15,64 triliun rupiah pada tahun 2018 menjadi 16,89 triliun rupiah di tahun 2019, atau meningkat sebesar 8,01 persen, sehingga memberikan andil terhadap pembentukan PDRB Pengeluaran sebesar 65,03 persen, lebih tinggi dibandingkan kontribusi tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 63,48 persen. Fluktuasi pengeluaran konsumsi rumah tangga ini biasanya dipengaruhi oleh tingkat harga (inflasi) dan pendapatan rumah tangga. Besarnya proporsi tersebut merupakan modal yang positif dalam mempertahankan atau meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, apalagi dengan jumlah penduduk Blora yang cukup besar yaitu sekitar 865 ribu jiwa, merupakan pangsa pasar yang cukup menarik. Konsumsi makanan, minuman dan rokok merupakan penyumbang terbesar,

disusul pengeluaran transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya; perumahan; hotel dan restoran; kesehatan dan pendidikan; pakaian dan alas kaki; dan pengeluaran lainnya.

**Tabel 3.7. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga  
adh Konstan (2010=100) Tahun 2015 – 2019 (Milyar Rupiah)**

URAIAN	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	2	3	4	5	6
a. Makanan, Minuman dan Rokok	3.794,90	3.912,44	4.089,60	4.286,19	4.451,04
b. Pakaian dan Alas Kaki	425,09	448,08	481,94	501,39	528,31
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyel Rmh Tangga	1.157,04	1.235,16	1.286,19	1.340,04	1.389,44
d. Kesehatan dan Pendidikan	644,12	687,02	726,88	767,33	803,14
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	2.758,66	2.940,14	3.108,67	3.257,57	3.492,29
f. Hotel dan Restoran	632,41	661,00	700,79	743,23	806,04
g. Lainnya	265,62	281,01	296,93	318,76	335,08
<b>Pengeluaran Konsumsi Rata</b>	<b>9.677,84</b>	<b>10.164,86</b>	<b>10.691,00</b>	<b>11.214,51</b>	<b>11.805,33</b>

Ket : \* Angka Sementara      \*\* Angka Sangat Sementara

Atas dasar harga konstan, pada tahun 2019 pengeluaran konsumsi rumah tangga mencatat pertumbuhan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 5,26 persen dari 11,21 triliun rupiah di tahun 2018 menjadi 11,80 triliun rupiah pada tahun 2019.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dikelompoknya menjadi 7 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan rokok, kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok perumahan, kelompok kesehatan dan pendidikan, kelompok transportasi, komunikasi dan rekreasi, kelompok hotel restoran dan pengeluaran lainnya, yaitu pengeluaran yang tidak masuk dalam salah satu dari poin-poin sebelumnya.

Kelompok makanan, minuman dan rokok merupakan kelompok dengan pengeluaran terbesar pada konsumsi rumah tangga. Tercatat sebesar 41,14 persen di tahun 2019, rata-rata rumah tangga mengeluarkan biaya untuk kelompok tersebut. Diikuti oleh kelompok transportasi, komunikasi dan rekreasi dengan prosentase sebesar 27,90 persen dari pengeluaran konsumsi rumah tangga di tahun yang sama. Sedangkan prosentase terkecil kedua adalah kelompok pakaian dan alas kaki, tercatat hanya sebesar 3,67 persen dari konsumsi rumah tangga di tahun 2019. Kemungkinan kelompok ini kebutuhannya atau pengeluarannya bisa dikatakan cukup jarang. Biasanya masyarakat akan banyak membeli pakaian dan alas kaki hanya pada momen-momen tertentu, seperti momen hari raya atau momen tahun ajaran baru.

**Tabel 3.8. Distribusi Kelompok Pengeluaran Terhadap Total Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga adh Berlaku Tahun 2015 – 2019 (%)**

KOMPONEN PENGELUARAN	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	2	3	4	5	6
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	42,07	42,41	41,88	41,63	41,14
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	3,71	3,69	3,73	3,70	3,67
1.c. Perumahan, Perkakas, Perleng dan Penyel Rmh Tangga	11,49	11,60	11,66	11,70	11,47
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	6,09	6,17	6,22	6,39	6,33
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	27,60	27,08	27,41	27,27	27,90
1.f. Hotel dan Restoran	6,42	6,41	6,46	6,61	6,82
1.g. Lainnya	2,62	2,63	2,62	2,70	2,67
<b>Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Ket:

\* Angka Sementara \*\* Angka Sangat Sementara

Dari tujuh kelompok pengeluaran rumah tangga, kelompok hotel dan restoran, pada tahun 2019 merupakan kelompok pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 8,45 persen, diikuti kelompok transportasi, komunikasi, rekreasi dan

budaya dengan pertumbuhan sebesar 7,21 persen. Sehingga secara agregat di tahun 2019 pertumbuhan pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga tercatat sebesar 5,27 persen.

**Tabel 3.9. Pertumbuhan Kelompok Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga  
adh Konstan (2010=100) Tahun 2015 – 2019 (%)**

URAIAN	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	2	3	4	5	6
a. Makanan, Minuman dan Rokok	1,71	3,10	4,53	4,81	3,85
b. Pakaian dan Alas Kaki	4,06	5,41	7,56	4,03	5,37
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyel Rmh Tangga	5,59	6,75	4,13	4,19	3,69
d. Kesehatan dan Pendidikan	2,79	6,66	5,80	5,56	4,67
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	4,14	6,58	5,73	4,79	7,21
f. Hotel dan Restoran	3,39	4,52	6,02	6,06	8,45
g. Lainnya	6,02	5,80	5,66	7,35	5,12
Pengeluaran Konsumsi Ruta	3,25	5,03	5,18	4,90	5,27

Ket : \* Angka Sementara \*\* Angka Sangat Sementara

Laju pertumbuhan konsumsi tidak lepas dari beberapa kondisi, antara lain: meningkatnya pendapatan masyarakat, perkembangan budaya di dalam masyarakat seperti perkembangan masyarakat yang semakin modern, disamping itu ada faktor lainnya seperti kemudahan rumah tangga untuk mendapatkan barang-barang konsumsi, seperti kendaraan bermotor, barang-barang elektronik atau barang keperluan rumah tangga lainnya melalui kredit perbankan, lembaga keuangan lainnya atau bahkan melalui pinjaman perorangan ataupun arisan tampaknya menjadi trend saat ini.

Secara ekonomi kegiatan semacam ini sedikit banyak akan meningkatkan gerak roda perekonomian. Berbagai kemudahan tersebut memacu peningkatan

pengeluaran konsumsi rumah tangga, akan tetapi dilihat dari segi pemanfaatan oleh rumah tangga belum tentu barang-barang yang dibeli akan menjadi alat penggerak ekonomi rumah tangga. Bila Pengeluaran barang yang didapat dengan mudah ini menjadi alat peningkatan ekonomi rumah tangga maka dampak dari hal tersebut akan menghidupkan kekuatan “*grass root*” dalam meningkatkan pendapatannya, bahkan akan menggerakkan roda pembangunan ekonomi yang pesat.

### **3.3. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit**

Pengertian lembaga Non Profit secara umum adalah setiap lembaga nirlaba yang independen dan tidak terpengaruh oleh institusi pemerintah. Secara khusus Bank Dunia mendefinisikan lembaga nirlaba sebagai *Non Government Organization (NGO)* atau kemudian juga diterjemahkan sebagai organisasi swasta yang pada umumnya bergerak dalam kegiatan-kegiatan pengentasan kemiskinan, mengangkat dan menyuarakan berbagai kepentingan orang miskin atau pihak yang terpinggirkan, memberikan pelayanan sosial dasar, atau melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Pada umumnya lembaga ini didalam operasionalnya disamping dukungan finansial ataupun non finansial dari rumah tangga juga tidak sedikit yang mendapat dukungan (finansial dan non finansial) dari pemerintah dan berbagai lembaga donor internasional. Karena sifatnya yang nirlaba, kegiatan-kegiatan yang dikembangkan oleh lembaga ini belum banyak menggerakkan roda perekonomian khususnya di Kabupaten Blora. Hal ini bisa dilihat dari kontribusi pengeluaran konsumsi lembaga tersebut terhadap PDRB. Secara agregat peran ekonomi lembaga nirlaba atau Non Profit masih sangat kecil jika dibandingkan dengan komponen-komponen penyusun PDRB yang lain.

Dilihat dari kontribusinya, pada tahun 2019 kontribusi pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit tercatat sebesar 1,46 persen dari total nilai PDRB atas dasar harga berlaku, sedikit meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 1,37 persen. Sedangkan untuk pertumbuhannya, di tahun 2019 lembaga nirlaba ini tumbuh sebesar 9,86 persen. Ada kegiatan yang cukup besar yang mendorong

lembaga nirlaba ini tumbuh cukup baik, yaitu momen Pemilu. Pemilu Presiden, wakil Presiden dan anggota legislatif. Adanya momen Pemilu tersebut Partai Politik dan *underbow* nya melakukan konsolidasi, rapat-rapat, sosialisasi yang itu mengeluarkan biaya yang cukup besar. Kondisi ini yang mendorong pertumbuhan lembaga nirlaba tersebut.

**Tabel 3.10. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Tahun 2015 – 2019**

URAIAN	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	2	3	4	5	6
Adh Berlaku (Milyar Rupiah)	276,37	281,53	300,23	336,73	379,04
Adh Konstan (Milyar Rupiah)	196,80	195,47	201,50	217,60	239,05
Distribusi (Adhb dalam %)	1,69	1,41	1,37	1,37	1,46
Pertumbuhan (Adhk dalam %)	-1,94	-0,68	3,08	7,99	9,86

Ket : \* Angka Sementara      \*\* Angka Sangat Sementara

Nilai konsumsi lembaga Non Profit adh berlaku pada tahun 2019 tercatat sebesar 379,04 milyar rupiah, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 12,56 persen. Sedangkan adh konstan tercatat sebesar 239,05 milyar rupiah. Sebagai lembaga yang memang tujuannya tidak mencari profit, secara ekonomi lembaga tersebut distribusi (terhadap PDRB) masih sangat kecil.

Mengingat peran lembaga ini lebih banyak berorientasi pada pelayanan masyarakat serta pembiayaannya ditanggung baik oleh masyarakat sendiri, lembaga donor maupun oleh pemerintah, sehingga peran lembaga ini kurang begitu berkembang, hal ini bisa dipahami karena memang lembaga tersebut tidak berorientasi kepada profit sehingga tidak banyak masyarakat yang mau terjun pada kegiatan tersebut. Di sisi lain, tampaknya pemerintah belum bisa mengoptimalkan peran lembaga Non Profit ini untuk membantu dalam pelayanan masyarakat, hal bisa



dilihat bahwa aliran dana untuk pelayanan masyarakat masih banyak yang bersifat langsung dari pemerintah kepada masyarakat, atau tidak melalui lembaga non profit.

### 3.4. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah adalah pengeluaran konsumsi Pemerintah Kabupaten/Kota, ditambah dengan pengeluaran konsumsi Dinas Provinsi dan Dinas Vertikal yang berada di Kabupaten/Kota tersebut. Termasuk belanja pemerintah yang langsung dialokasikan kepada masyarakat, seperti Raskin/Rastra. Sumber dana pengeluaran Konsumsi Pemerintah berasal baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer dari Pemerintah Propinsi dan Pusat ( dalam bentuk DAU/ DAK) maupun dari sumber pendapatan lain yang sah. Salah satu sumber pendanaan pemerintah adalah pajak. Dalam teori ekonomi, tingkat pajak akan mempengaruhi *mutiplier* regional. Tingkat pajak yang tinggi akan menurunkan *multiplier* regional, akan tetapi pajak pada akhirnya akan menjadi pengeluaran pemerintah yang tentunya akan meningkatkan pendapatan regional.

Dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, pemerintah membutuhkan anggaran yang digunakan untuk keperluan belanja rutin pegawai dan keperluan pembiayaan pembangunan. Besar kecilnya pengeluaran konsumsi pemerintah dipengaruhi oleh komponen belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal serta belanja pemerintah lainnya. Peran yang dimiliki oleh pemerintah ini digunakan terutama untuk membiayai kegiatan-kegiatan pelayanan yang tidak dapat dilakukan oleh pihak swasta. Jumlah pengeluaran pemerintah ini merupakan salah satu komponen penting dari PDRB. Secara teoritis kenaikan pengeluaran pemerintah merupakan salah satu kebijakan untuk meningkatkan pembangunan lewat instrumen kebijakan fiskal. Instrumen ini diambil untuk meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dapat meningkatkan kehidupan perekonomian.

**Tabel 3.11. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Tahun 2015-2019**

URAIAN	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	2	3	4	5	6
Adh Berlaku (Milyar Rupiah)	1.883,59	1.959,94	2.070,06	2.185,49	2.254,74
Adh Konstan (Milyar Rupiah)	1.322,02	1.325,21	1.358,33	1.411,87	1.445,19
Distribusi (Adhb dalam %)	11,51	9,79	9,47	8,87	8,68
Pertumbuhan (Adhk dalam %)	4,79	0,24	2,50	3,94	2,36

Ket : \* Angka Sementara      \*\* Angka Sangat Sementara

Dalam beberapa tahun terakhir, pengeluaran pemerintah secara nominal semakin bertambah dari tahun ke tahun, yang bisa dilihat pada APBD maupun APBN. Kontribusi pengeluaran Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB pada tahun 2019 adh berlaku tercatat sebesar 8,68 persen dengan nominal sebesar 2,25 triliun rupiah meningkat sebesar 3,17 persen dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 2,18 triliun rupiah. Sedangkan untuk angka pertumbuhannya, pertumbuhan pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada tahun 2019 tercatat sebesar 2,36 persen. Peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah dapat digunakan sebagai akselerator pembangunan ekonomi, walaupun pada saat ini tampaknya masih diarahkan pada hal-hal yang bersifat pelayanan secara langsung pada masyarakat seperti pelayanan pendidikan, kesehatan maupun ekonomi.

### **3.5. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)**

Para pakar ekonomi sepakat bahwa untuk mendorong roda perekonomian salah satu mesin penggeraknya adalah investasi. Dalam konteks PDRB Pengeluaran, investasi dikenal sebagai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ditambah dengan Inventori. PMTB menggambarkan adanya proses penambahan dan pengurangan barang modal pada tahun tertentu. PMTB disebut sebagai “bruto” karena di dalamnya masih terkandung unsur penyusutan, atau nilai barang modal

sebelum diperhitungkan nilai penyusutannya. PMTB adalah semua pengadaan barang modal untuk digunakan/dipakai sebagai aset yang tetap (*fixed assets*). Sumber dana investasi dapat berasal dari tabungan domestik atau pinjaman luar negeri yang meningkatkan tingkat tabungan suatu daerah. Perkembangan lembaga keuangan juga mempengaruhi tingkat tabungan karena berhubungan dengan kemungkinan investor asing untuk melakukan investasi. Bagi wilayah yang memiliki tingkat tabungan domestik tidak memadai untuk menjalankan negara sekaligus berinvestasi, maka alternatif yang dilakukan umumnya adalah melalui pinjaman luar negeri atau mengundang investor untuk berinvestasi. Dilihat dari institusi pelaku PMTB terbagi empat yaitu Swasta, Rumah Tangga, BUMN dan BUMD dan Pemerintah. Belanja pemerintah dalam bentuk barang modal (terutama Infrastruktur) menjadi stimulus yang mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi pembangunan ekonomi. Korelasi antara laju pertumbuhan ekonomi dengan investasi dikenal dengan *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*. ICOR menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi relatif akibat adanya investasi. Dengan ICOR kita dapat melihat efisiensi Pengeluaran modal yang secara signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah pada tahun tertentu.

Kabupaten Blora yang memiliki potensi sumber daya alam, tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor. Tetapi sebelum menanamkan modalnya, investor akan punya hitungan-hitungan tersendiri, seperti ketersediaan lokasi, ketersediaan bahan baku, kemudahan akses dan yang nggak kalah penting adalah diregulasi yang jelas untuk keberlangsungan suatu usaha.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atas dasar harga berlaku di Kabupaten Blora pada tahun 2019 bergerak dari 2,76 triliun rupiah pada tahun 2018 menjadi 3,04 triliun rupiah di tahun 2019, atau mengalami kenaikan sebesar 9,93 persen. PMTB merupakan kelompok penyumbang besar pada PDRB dimana pada tahun 2019 sumbangan komponen ini tercatat sebesar 11,69 persen ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Untuk harga konstan angka PMTB bergerak dari 1,98

triliun rupiah di tahun 2018 menjadi 2,09 triliun rupiah di tahun 2019, atau tumbuh sebesar 5,80 persen.

**Tabel 3.12. Pembentukan Modal Tetap Bruto Tahun 2015 – 2019**

URAIAN	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	2	3	4	5	6
Adh Berlaku (Milyar Rupiah)	2.076,23	2.251,53	2.464,82	2.762,77	3.037,22
Adh Konstan (Milyar Rupiah)	1.629,37	1.726,03	1.851,69	1.976,21	2.090,86
Distribusi (Adhb dalam %)	12,68	11,25	11,27	11,21	11,69
Pertumbuhan (Adhk dalam %)	4,64	5,93	7,28	6,72	5,80

Ket : \* Angka Sementara      \*\* Angka Sangat Sementara

Secara umum, PMTB terbagi kedalam 8 jenis aset, yaitu bangunan, mesin dan perlengkapan, kendaraan, peralatan lain, hewan menghasilkan berulang, tanamn menghasilkan berulang, produk kekayaan intelektual dan biaya alih kepemilikan aset tak diproduksi. Tetapi karena kendala data dan metode penghitungannya, maka dalam memperoleh nilai PMTB sifatnya masih agregat (belum bisa dipecah ke dalam kelompok 8 tadi).

Terkadang PMTB yang dibentuk tidak langsung memiliki *multiplier effect* terhadap perkembangan ekonomi, karena ada kalanya PMTB yang dibentuk bersifat investasi jangka panjang yang baru terlihat hasilnya pada tahun-tahun berikutnya, seperti investasi dalam bentuk sarana dan prasarana, atau investasi pada sektor-sektor yang membutuhkan waktu lebih dari satu tahun pada suatu unit usaha untuk dapat memulai produksinya. Walaupun secara matematis ketika PMTB terbentuk pada tahun tersebut angka PDRB akan bertambah secara signifikan.

Mengingat pentingnya PMTB dalam menggerakkan perekonomian, maka kinerja PMTB ini harus dapat dipertahankan terus dan berkesinambungan. Secara teori ekonomi terdapat beberapa kebijakan yang dijadikan rujukan dalam

meningkatkan kinerja PMTB atau investasi secara umum. Beberapa pendapat tersebut adalah :

1. Mengusahakan sarana dan prasarana perhubungan yang baik dan lancar, serta perbaikan arus komunikasi dan penyebar luasan informasi potensi wilayah.
2. Mengusahakan masuknya dana investasi dari pemerintah pusat atau luar negeri sebanyak-banyaknya, termasuk investasi swasta dalam dan luar negeri, dengan cara menawarkan program-program yang bisa dibiayai atau menarik untuk dibiayai.
3. Memantau kebutuhan wilayah lain atau luar negeri untuk melihat potensi wilayah yang dapat dikembangkan untuk memberikan penawaran.

Menarik investor untuk menanamkan modal baik berupa investasi kegiatan baru atau perluasan dari usaha yang telah ada sangatlah penting, karena dapat berdampak pada penambahan lapangan kerja yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Sehingga secara makro terjadi peningkatan pendapatan di wilayah tersebut selanjutnya akan menggerakkan roda perekonomian. Hal yang perlu mendapat perhatian tentunya adalah investasi diarahkan pada basis ekonomi yang banyak menggunakan komponen lokal, kalo bisa yang dapat bersinergi dengan usaha yang telah terbentuk sebelumnya. Kendala yang menghambat masuknya para investor baik berupa stabilitas sosial, peraturan-peraturan dan jaminan penanaman modal harus mendapat perhatian dan kemudahan tanpa mengorbankan kualitas sumber daya alam dan usaha tingkat bawah yang telah ada di wilayah tersebut.

### **3.6. Net Ekspor**

Net ekspor merupakan selisih antara nilai ekspor dan nilai impor. Nilai net ekspor muncul sejalan dengan ketebatas data ekspor dan impor antar wilayah. Apalagi sebagai daerah yang terbuka secara ekonomi, pencatatan arus barang dan jasa sangat sulit dilakukan. Untuk itulah digunakan suatu model yang berlandaskan pada teori input output. Ketika ada daerah yang kelebihan produksi maka biasanya akan melakukan ekspor, dan sebaliknya apabila suatu daerah

mengonsumsi suatu barang dan jasa dan tidak diproduksi atau produksinya kurang bisa memenuhi di daerah tersebut, maka biasanya melakukan impor.

Dalam struktur permintaan akhir, Ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar atau non domestik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Istilah Ekspor disamping merujuk pada barang dan jasa yang dibawa keluar dari suatu wilayah domestik, juga mencakup pembelian barang dan jasa oleh penduduk luar wilayah atas produk ekonomi domestik.

Dalam teorinya mengatakan bahwa besaran ekspor berbanding lurus dengan besaran angka PDRB. Tetapi tidak semua wilayah dapat melakukan apa yang dinamakan dengan Ekspor tersebut. David Ricardo menyatakan bahwa ekspor atau perdagangan internasional dapat terjadi apabila terdapat perbedaan keunggulan komparatif dari setiap wilayah/negara. Keunggulan komparatif ini dapat dicapai apabila sebuah wilayah/negara mampu memproduksi sejumlah barang dengan volume besar namun dengan biaya yang lebih kecil dibandingkan dengan negara lain. Teori ini disebut sebagai teori Komperatif. Tetapi ekspor juga bisa terjadi karena keunggulan kompetitif suatu wilayah, teori ini dikembangkan oleh Michael E. Porter, ia menyatakan: terdapat empat hal yang menyebabkan perusahaan dapat saling berkompetisi sehingga memunculkan adanya keunggulan kompetitif, kondisi faktor produksi, kondisi permintaan, industri yang terkait dengan industri pendukung dan strategi, struktur dan persaingan.

Untuk bisa meningkatkan angka PDRB atau angka pertumbuhan ekonomi, salah satunya bisa didorong melalui ekspor. Untuk itu perlu kiranya pemerintah membuat kebijakan maupun rencana strategis yang terkait dengan ekspor. Beberapa pola kebijakan tersebut antara lain:

1. Mendorong usaha yang dikategorikan sebagai sektor basis, melalui peningkatan mutu supaya bisa bersaing dengan produk luar yang sejenis.
2. Mendorong industri pengolahan untuk lebih dominan memakai komponen atau bahan baku lokal
3. Mendorong penciptaan industri berorientasi ekspor dan industri substitusi impor.

4. Menentukan sektor dan komoditi basis yang diperkirakan bisa tumbuh cepat dan orientasi ekspor secara berkesinambungan, serta dapat bersinergi dengan sektor lain sehingga mendorong sektor lain juga ikut tumbuh.

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor barang dan jasa merupakan tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari luar wilayah (Blora). Karena impor bukan merupakan produk yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Blora, oleh karenanya impor bernilai negatif dalam penghitungan PDRB.

Meskipun secara teoritis kegiatan impor itu memperkecil angka PDRB, tetapi impor itu bisa dikatakan nggak bisa dipungkiri. Beberapa hal suatu wilayah melakukan impor antara lain:

1. Memperoleh barang dan jasa yang tidak ada atau tidak diproduksi di wilayah tersebut.
2. Impor yang dilakukan oleh suatu negara digunakan juga sebagai bagian dari alih teknologi.
3. Memperoleh bahan baku untuk proses lebih lanjut ataupun barang jadi untuk konsumsi. Tidak semua wilayah/negara bisa mencukupi semua kebutuhannya. Sehingga dibutuhkan impor dari negara/wilayah lainnya.
4. Impor digunakan untuk menstabilkan harga. Biasanya untuk barang dan jasa yang sangat dibutuhkan masyarakat dan ketika terjadi gejolak harga sangat berpengaruh terhadap stabilitas wilayah, maka kegiatan impor bisa digunakan sebagai alat penstabil.

**Tabel 3.13. Net Ekspor Tahun 2015 – 2019**

URAIAN	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	2	3	4	5	6
Adh Berlaku (Milyar Rupiah)	-557,21	1.945,56	2.297,00	3.591,73	3.317,30
Adh Konstan (Milyar Rupiah)	7,20	2.440,00	2.701,04	2.733,77	2.682,49
Distribusi (Adhb dalam %)	9,72	10,50	14,58	12,77	9,72

Ket : \* Angka Sementara      \*\* Angka Sangat Sementara

Pada tahun 2019 selisih nilai ekspor dan impor adh berlaku sebesar 3,32 trikiun rupiah, turun dari tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar 3,59 triliun rupiah. Jika nilai net ekspor adh berlaku dibagi dengan PDRB, nilainya tercatat sebesar 9,72 persen di tahun 2019. Sedangkan di tahun yang sama, nilai net ekspor adh konstan tercatat sebesar 2,68 triliun rupiah, yang nilainya juga turun dibandingkan tahun sebelumnya.

Nilai net ekspor sejak tahun 2016, bernilai positif, kondisi ini terjadi salah satunya karena operasionalnya proyek gas Gundih yang merupakan kegiatan pengeboran gas alam. Dimana hampir semua outputnya dikirim ke luar, salah satunya ke pembangkit listrik Tambaklorok Semarang.



# Lampiran Tabel

<https://blorakab.bps.go.id>



Tabel 1 : PDRB Kabupaten Blora Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)

KOMPONEN PENGELUARAN	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	2	3	4	5	6
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	12.519.112,12	13.512.077,62	14.639.081,85	15.640.901,35	16.894.337,07
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	5.266.546,61	5.730.778,82	6.131.422,27	6.510.709,02	6.949.606,15
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	464.937,91	498.266,30	546.495,48	578.567,90	620.856,14
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyel Rmh Tangg	1.438.281,37	1.567.853,72	1.707.488,97	1.829.788,64	1.938.313,11
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	762.511,31	833.614,91	910.819,16	999.388,24	1.068.685,84
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	3.455.830,29	3.659.551,10	4.012.978,96	4.265.920,13	4.713.422,54
1.f. Hotel dan Restoran	803.431,18	866.741,56	946.298,58	1.034.114,51	1.151.553,31
1.g. Lainnya	327.573,45	355.271,22	383.578,43	422.412,91	451.899,97
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	276.366,00	281.527,58	300.229,03	336.733,62	379.035,97
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.883.589,12	1.959.936,71	2.070.058,86	2.185.489,10	2.254.739,47
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.076.228,13	2.251.527,40	2.464.817,86	2.762.773,97	3.037.220,17
4.a. Bangunan	1.676.644,47	1.838.233,92	2.016.266,87	2.255.588,48	2.484.851,18
4.b. Non-Bangunan	399.583,66	413.293,48	448.550,99	507.185,49	552.368,99
5. Perubahan Inventori	170.260,30	60.317,48	94.643,49	119.770,86	94.810,51
6. Ekspor Neto	(557.208,61)	1.945.560,56	2.297.000,08	3.591.734,83	3.317.303,15
<b>PDRB PENGELUARAN</b>	<b>16.368.347,06</b>	<b>20.010.947,35</b>	<b>21.865.831,17</b>	<b>24.637.403,73</b>	<b>25.977.446,33</b>

Ket : \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Tabel 2 : PDRB Kabupaten Blora Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan (2010=100) Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)

KOMPONEN PENGELUARAN	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	2	3	4	5	6
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	9.677.842,67	10.164.862,13	10.691.004,91	11.214.505,65	11.805.332,10
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	3.794.895,63	3.912.436,31	4.089.596,29	4.286.191,68	4.451.035,77
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	425.092,49	448.081,66	481.942,59	501.388,53	528.313,09
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyel Rmh Tangg	1.157.039,95	1.235.162,07	1.286.191,11	1.340.039,58	1.389.440,52
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	644.122,60	687.024,50	726.884,87	767.327,61	803.141,39
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	2.758.657,89	2.940.139,27	3.108.667,67	3.257.568,02	3.492.287,47
1.f. Hotel dan Restoran	632.414,00	661.003,57	700.792,56	743.234,63	806.037,96
1.g. Lainnya	265.620,11	281.014,75	296.929,82	318.755,60	335.075,89
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	196.802,84	195.472,31	201.497,64	217.599,32	239.054,61
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.322.016,37	1.325.214,08	1.358.325,41	1.411.871,52	1.445.191,69
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.629.365,32	1.726.025,57	1.851.685,83	1.976.211,60	2.090.856,50
4.a. Bangunan	1.324.606,81	1.426.204,15	1.536.801,49	1.640.871,47	1.747.199,95
4.b. Non-Bangunan	304.758,51	299.821,43	314.884,34	335.340,12	343.656,56
5. Perubahan Inventori	49.365,10	63.093,20	63.090,82	55.758,97	59.201,36
6. Ekspor Neto	7.195,41	2.439.996,13	2.701.036,18	2.733.769,01	2.682.493,40
<b>PDRB PENGELUARAN</b>	<b>12.882.587,70</b>	<b>15.914.663,42</b>	<b>16.866.640,78</b>	<b>17.609.716,06</b>	<b>18.322.129,66</b>

Ket : \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Tabel 3 : Distribusi PDRB Kabupaten Blora Menurut Pengeluaran  
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2019 (Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	2	3	4	5	6
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	76,48	67,52	66,95	63,48	65,03
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	32,18	28,64	28,04	26,43	26,75
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,84	2,49	2,50	2,35	2,39
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyel Rmh Tangg	8,79	7,83	7,81	7,43	7,46
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,66	4,17	4,17	4,06	4,11
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	21,11	18,29	18,35	17,31	18,14
1.f. Hotel dan Restoran	4,91	4,33	4,33	4,20	4,43
1.g. Lainnya	2,00	1,78	1,75	1,71	1,74
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	1,69	1,41	1,37	1,37	1,46
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11,51	9,79	9,47	8,87	8,68
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	12,68	11,25	11,27	11,21	11,69
4.a. Bangunan	10,24	9,19	9,22	9,16	9,57
4.b. Non-Bangunan	2,44	2,07	2,05	2,06	2,13
5. Perubahan Inventori	1,04	0,30	0,43	0,49	0,36
6. Ekspor Neto	-3,40	9,72	10,50	14,58	12,77
<b>PDRB PENGELUARAN</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Ket : \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Tabel 4 : Distribusi PDRB Kabupaten Blora Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan (2010=100) Tahun 2015-2019 (Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	2	3	4	5	6
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	75,12	63,87	63,39	63,68	64,43
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	29,46	24,58	24,25	24,34	24,29
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	3,30	2,82	2,86	2,85	2,88
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyel Rmh Tangg	8,98	7,76	7,63	7,61	7,58
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	5,00	4,32	4,31	4,36	4,38
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	21,41	18,47	18,43	18,50	19,06
1.f. Hotel dan Restoran	4,91	4,15	4,15	4,22	4,40
1.g. Lainnya	2,06	1,77	1,76	1,81	1,83
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,53	1,23	1,19	1,24	1,30
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10,26	8,33	8,05	8,02	7,89
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	12,65	10,85	10,98	11,22	11,41
4.a. Bangunan	10,28	8,96	9,11	9,32	9,54
4.b. Non-Bangunan	2,37	1,88	1,87	1,90	1,88
5. Perubahan Inventori	0,38	0,40	0,37	0,32	0,32
6. Ekspor Neto	0,06	15,33	16,01	15,52	14,64
<b>PDRB PENGELUARAN</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Ket : \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Tabel 5 : Indeks Perkembangan PDRB Kabupaten Blora Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2019 (Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	2	3	4	5	6
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	158,49	171,06	185,33	198,01	213,88
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	147,47	160,47	171,69	182,31	194,60
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	134,95	144,63	158,63	167,94	180,21
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyel Rmh Tangg	163,73	178,48	194,38	208,30	220,65
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	151,57	165,70	181,05	198,66	212,43
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	178,89	189,43	207,73	220,82	243,98
1.f. Hotel dan Restoran	160,58	173,23	189,13	206,68	230,15
1.g. Lainnya	193,16	209,49	226,18	249,08	266,47
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	177,28	180,59	192,58	216,00	243,14
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	175,01	182,11	192,34	203,06	209,50
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	174,30	189,01	206,92	231,93	254,97
4.a. Bangunan	168,48	184,71	202,60	226,65	249,69
4.b. Non-Bangunan	203,84	210,84	228,82	258,73	281,78
5. Perubahan Inventori	307,40	108,90	170,88	216,24	171,18
6. Ekspor Neto	243,62	-850,63	-1004,28	-1.570,36	-1.450,37
<b>PDRB PENGELUARAN</b>	<b>161,28</b>	<b>197,17</b>	<b>215,45</b>	<b>242,76</b>	<b>255,96</b>

Ket : \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Tabel 6 : Indeks Perkembangan PDRB Kabupaten Blora Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan (2010=100) Tahun 2015-2019 (Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	2	3	4	5	6
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	122,52	128,68	135,35	141,97	149,45
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	106,26	109,55	114,52	120,02	124,64
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	123,39	130,06	139,89	145,53	153,35
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyel Rmh Tangg	131,71	140,61	146,42	152,55	158,17
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	128,04	136,57	144,49	152,53	159,65
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	142,80	152,19	160,92	168,62	180,77
1.f. Hotel dan Restoran	126,40	132,11	140,06	148,54	161,10
1.g. Lainnya	156,63	165,70	175,09	187,96	197,58
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	126,24	125,39	129,25	139,58	153,34
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	122,83	123,13	126,21	131,18	134,28
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	136,78	144,90	155,45	165,90	175,52
4.a. Bangunan	133,10	143,31	154,42	164,88	175,57
4.b. Non-Bangunan	155,47	152,95	160,63	171,07	175,31
5. Perubahan Inventori	89,13	113,91	113,91	100,67	106,89
6. Ekspor Neto	-3,15	-1.066,80	-1.180,93	-1.195,24	-1.172,82
<b>PDRB PENGELUARAN</b>	<b>126,93</b>	<b>156,81</b>	<b>166,19</b>	<b>173,51</b>	<b>180,53</b>

Ket : \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Tabel 7 : Indeks Berantai PDRB Kabupaten Blora Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2019 (Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	2	3	4	5	6
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	107,33	107,93	108,34	106,84	108,01
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	106,22	108,81	106,99	106,19	106,74
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	106,74	107,17	109,68	105,87	107,31
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyel Rmh Tangg	107,80	109,01	108,91	107,16	105,93
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	105,54	109,32	109,26	109,72	106,93
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	108,97	105,89	109,66	106,30	110,49
1.f. Hotel dan Restoran	108,30	107,88	109,18	109,28	111,36
1.g. Lainnya	109,04	108,46	107,97	110,12	106,98
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	107,13	101,87	106,64	112,16	112,56
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	114,98	104,05	105,62	105,58	103,17
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	111,22	108,44	109,47	112,09	109,93
4.a. Bangunan	112,43	109,64	109,69	111,87	110,16
4.b. Non-Bangunan	106,42	103,43	108,53	113,07	108,91
5. Perubahan Inventori					
6. Ekspor Neto					
<b>PDRB PENGELUARAN</b>	<b>108,39</b>	<b>122,25</b>	<b>109,27</b>	<b>112,68</b>	<b>105,44</b>

Ket : \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara



Tabel 8 : Indeks Berantai PDRB Kabupaten Blora Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan (2010=100) Tahun 2015-2019 (Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	2	3	4	5	6
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	103,25	105,03	105,18	104,90	105,27
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	101,71	103,10	104,53	104,81	103,85
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	104,06	105,41	107,56	104,03	105,37
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyel Rmh Tangg	105,59	106,75	104,13	104,19	103,69
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	102,79	106,66	105,80	105,56	104,67
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	104,14	106,58	105,73	104,79	107,21
1.f. Hotel dan Restoran	103,39	104,52	106,02	106,06	108,45
1.g. Lainnya	106,02	105,80	105,66	107,35	105,12
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	98,06	99,32	103,08	107,99	109,86
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	104,79	100,24	102,50	103,94	102,36
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	104,64	105,93	107,28	106,72	105,80
4.a. Bangunan	106,31	107,67	107,75	106,77	106,48
4.b. Non-Bangunan	97,97	98,38	105,02	106,50	102,48
5. Perubahan Inventori					
6. Ekspor Neto					
<b>PDRB PENGELUARAN</b>	<b>105,36</b>	<b>123,54</b>	<b>105,98</b>	<b>104,41</b>	<b>104,05</b>

Ket : \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Tabel 9: Pertumbuhan PDRB Kabupaten Blora Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2019 (Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	2	3	4	5	6
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	7,33	7,93	8,34	6,84	8,01
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	6,22	8,81	6,99	6,19	6,74
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	6,74	7,17	9,68	5,87	7,31
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyel Rmh Tangg	7,80	9,01	8,91	7,16	5,93
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	5,54	9,32	9,26	9,72	6,93
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	8,97	5,89	9,66	6,30	10,49
1.f. Hotel dan Restoran	8,30	7,88	9,18	9,28	11,36
1.g. Lainnya	9,04	8,46	7,97	10,12	6,98
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	7,13	1,87	6,64	12,16	12,56
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	14,98	4,05	5,62	5,58	3,17
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	11,22	8,44	9,47	12,09	9,93
4.a. Bangunan	12,43	9,64	9,69	11,87	10,16
4.b. Non-Bangunan	6,42	3,43	8,53	13,07	8,91
5. Perubahan Inventori					
6. Ekspor Neto					
<b>PDRB PENGELUARAN</b>	<b>8,39</b>	<b>22,25</b>	<b>9,27</b>	<b>12,68</b>	<b>5,44</b>

Ket : \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Tabel 10: Pertumbuhan PDRB Kabupaten Blora Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan (2010=100) Tahun 2015-2019 (Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	2	3	4	5	6
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,25	5,03	5,18	4,90	5,27
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	1,71	3,10	4,53	4,81	3,85
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	4,06	5,41	7,56	4,03	5,37
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyel Rmh Tangg	5,59	6,75	4,13	4,19	3,69
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	2,79	6,66	5,80	5,56	4,67
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	4,14	6,58	5,73	4,79	7,21
1.f. Hotel dan Restoran	3,39	4,52	6,02	6,06	8,45
1.g. Lainnya	6,02	5,80	5,66	7,35	5,12
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	-1,94	-0,68	3,08	7,99	9,86
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,79	0,24	2,50	3,94	2,36
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,64	5,93	7,28	6,72	5,80
4.a. Bangunan	6,31	7,67	7,75	6,77	6,48
4.b. Non-Bangunan	-2,03	-1,62	5,02	6,50	2,48
5. Perubahan Inventori					
6. Ekspor Neto					
<b>PDRB PENGELUARAN</b>	<b>5,36</b>	<b>23,54</b>	<b>5,98</b>	<b>4,41</b>	<b>4,05</b>

Ket : \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Tabel 11: Indeks Implisit PDRB Kabupaten Blora Menurut Pengeluaran Tahun 2015-2019 (Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	2	3	4	5	6
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	129,36	132,93	136,93	139,47	143,11
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	138,78	146,48	149,93	151,90	156,13
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	109,37	111,20	113,39	115,39	117,52
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyel Rmh Tangg	124,31	126,94	132,76	136,55	139,50
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	118,38	121,34	125,30	130,24	133,06
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	125,27	124,47	129,09	130,95	134,97
1.f. Hotel dan Restoran	127,04	131,13	135,03	139,14	142,87
1.g. Lainnya	123,32	126,42	129,18	132,52	134,86
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	140,43	144,02	149,00	154,75	158,56
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	142,48	147,90	152,40	154,79	156,02
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	127,43	130,45	133,11	139,80	145,26
4.a. Bangunan	126,58	128,89	131,20	137,46	142,22
4.b. Non-Bangunan	131,11	137,85	142,45	151,25	160,73
5. Perubahan Inventori	344,90	95,60	150,01	214,80	160,15
6. Ekspor Neto	-7743,94	79,74	85,04	131,38	123,66
<b>PDRB PENGELUARAN</b>	<b>127,06</b>	<b>125,74</b>	<b>129,64</b>	<b>139,91</b>	<b>141,78</b>

Ket : \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Tabel 12: Perubahan Indeks Implisit PDRB Kabupaten Blora  
Menurut Pengeluaran Tahun 2015-2019 (Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	2	3	4	5	6
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,96	2,76	3,01	1,86	2,61
1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	4,44	5,55	2,36	1,32	2,79
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,57	1,67	1,97	1,76	1,84
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyel Rmh Tangg	2,10	2,11	4,59	2,86	2,16
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	2,68	2,50	3,27	3,94	2,17
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	4,64	-0,64	3,71	1,44	3,06
1.f. Hotel dan Restoran	4,75	3,21	2,98	3,04	2,68
1.g. Lainnya	2,85	2,51	2,18	2,58	1,77
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	9,25	2,56	3,45	3,86	2,46
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9,73	3,80	3,04	1,57	0,79
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,29	2,37	2,04	5,03	3,91
4.a. Bangunan	5,76	1,83	1,79	4,77	3,46
4.b. Non-Bangunan	8,62	5,13	3,34	6,17	6,27
5. Perubahan Inventori					
6. Ekspor Neto					
<b>PDRB PENGELUARAN</b>	<b>2,87</b>	<b>-1,04</b>	<b>3,10</b>	<b>7,92</b>	<b>1,34</b>

Ket : \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA

— *Enlighten The Nation* —



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BLORA**

Jalan Rajawali Nomor 12 Blora; Telp. (0296) 531191;

E-mail: [bps3316@bps.go.id](mailto:bps3316@bps.go.id) Homepage: <http://blorakab.bps.go.id>